

**POLA KELOLA WAKAF DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
EKONOMI BERBASIS PESANTREN
(Studi Wakaf Pertanian Ubi pada Lembaga Wakaf Ansor)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ISNAINI QURROTI A'YUNI

145020500111018

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	20
1.3 Tujuan	20
1.4 Manfaat.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Wakaf Dalam Komponen Islam.....	22
2.1.1 Definisi Wakaf	22
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	24
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	25
2.1.4 Macam-Macam Wakaf	27
2.2 Pola Kelola Wakaf Menurut Manajemen Wakaf Produktif	31
2.3 Teori Kontrak dan Asimetri Informasi	32
2.4 Hak Kepemilikan.....	34
2.5 Kesejahteraan Masyarakat dalam Dimensi Ekonomi	37
2.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Islam	39
2.7 Penelitian Terdahulu	44
2.8 Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Pendekatan.....	52
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	53
3.4 Unit Analisis dan Penentuan Informan	54
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	54
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7 Teknik Analisis Data	56
3.8 Teknik Pengujian Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lembaga Wakaf Ansor.....	60
4.2 Pola Pengelolaan Wakaf Lahan melalui Pertanian Ubi	64
4.2.1 Pola Pertama: Kerjasama LWA dan Pesantren	69
4.2.2 Pola Kedua: Teknis Pengelolaan Masa Tanam Wakaf Pertanian	77
4.2.3 Pola Ketiga: Pola Pengelolaan Pasca Panen	81
4.3 Pengelolaan Wakaf melalui Pertanian Ubi dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	85
4.3.1 Peran Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal.....	87
4.4 Ringkasan Hasil Penelitian	91
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perolehan Wakaf Tunai di Indonesia Tahun 2008-2012	9
Tabel 1.2 Konsumsi Nasional Komoditas Ubi Jalar Tahun 2010 - 2015	14
Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Komoditas Ubi Jalar	15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia	64
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Wakaf di Provinsi Jawa Barat hingga 2016	67
Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Penelitian	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Macam-Macam Wakaf.....	7
Gambar 1.2 Lahan Wakaf Yang Dikelola Menjadi Pertanian Ubi.....	16
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	50
Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf Pertanian Ubi secara Garis Besar	68
Gambar 4.2 Pola Pertama : Kerjasama LWA dengan Pesantren	70
Gambar 4.3 Gambaran Lahan Wakaf yang dikelola Wakaf Pertanian Ubi	73
Gambar 4.4 Contoh Tanaman Ubi yang Siap Panen dari Wakaf Pertanian Ubi	75
Gambar 4.5 Pola Kedua: Teknis Pengelolaan Masa Tanam Wakaf Pertanian ..	78
Gambar 4.6 Gambaran Pengelolaan Pada Lahan Pertanian Ubi	80
Gambar 4.7 Pola Ketiga: Pengelolaan Pasca Panen	81
Gambar 4.8 Foto Hasil Panen Wakaf Pertanian Ubi	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu komponen dalam ekonomi islam. Wakaf memiliki perbedaan dibandingkan komponen lainnya seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Wakaf memiliki perbedaan dikarenakan nilai asli dari harta wakaf harus tetap abadi dan tidak boleh berkurang. Perbedaan yang dimiliki wakaf menyebabkan wakaf dapat dikatakan sebagai dana abadi umat. Nilai pokok wakaf dapat dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf memiliki peran yang cukup penting di dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan, agama hingga kesehatan (Muhtasib, 2013).

Menurut Usman (2009) wakaf secara istilah berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Wakaf memiliki perbedaan dibandingkan dengan zakat. Aset wakaf harus tetap dijaga namun dapat diambil manfaatnya. Karakteristik pada aset wakaf berbeda dengan zakat yang dapat menggunakan asetnya untuk diberikan kepada *muzakki*. Manfaat aset wakaf memiliki dampak lebih luas kepada masyarakat dibandingkan zakat.

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama dikelola secara optimal. Adanya Potensi wakaf sebagai lembaga ekonomi disebabkan institusi perwakafan merupakan salah satu aset

kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa (Saadati, 2016). Oleh karena itu, penting dalam sebuah aset wakaf terdapat manajemen pengelolaan terpadu. Bertujuan supaya aset wakaf dapat terus terjaga, sehingga manfaatnya tetap dapat digunakan sebagai kepentingan umat. Selain itu, perlu untuk terus melakukan inovasi agar pemberdayaan aset wakaf mampu menjadi penopang perekonomian secara luas.

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjadi dasar kuat bahwa wakaf merupakan salah satu amal yang penting bagi umat Islam. Landasan hukum wakaf dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebaikan dalam melakukan sedekah terhadap harta kekayaannya. Selain itu, landasan hukum lain mengenai wakaf di dalam Al-Quran juga terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Kedua ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan anjuran untuk menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki agar memperoleh pahala dan kebaikan.

Selain ayat Al-Qur'an, di dalam hadist juga terdapat dalil yang menjadi dasar hukum wakaf.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“ Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shalih”* (HR. Muslim no. 1631)

Hadist diatas menunjukkan pentingnya amal dalam harta salah satunya wakaf. Wakaf sendiri termasuk bentuk amal yang tetap nilainya sehingga mampu memberikan kebaikan bagi umat.

Wakaf sebenarnya telah berkembang sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa itu sahabat mewakafkan tanah pertaniannya untuk dikelola. Hasil dari pengelolaan tanah diambil guna kemaslahatan umat. Beberapa sahabat

Rasulullah SAW lainnya juga mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya. Salah satu bentuk wakaf pada masa Rasulullah adalah pembangunan Masjid Quba'. Masjid Quba' adalah salah satu bentuk wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Rasulullah SAW juga mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi dimana tanah yang diwakafkan dibeli oleh Rasulullah dari anak yatim Bani Hajar.

Wakaf kemudian berlanjut dan berkembang pada masa Khalifah. Salah satunya adalah pada masa Umar bin Khatab. Khalifah Umar bin Khattab pada masanya mewakafkan tanah yang diperolehnya yaitu di Khaibar. Keputusan wakaf juga disusul oleh sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya yaitu Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah di Makkah yang diperuntukkan bagi keturunannya. Wakaf juga dilakukan pada masa khalifah lainnya yaitu pada masa Khalifah Utsman. Khalifah Utsman juga mewakafkan hartanya untuk dikelola agar hasilnya dapat digunakan sebagai kepentingan umat (Donna, 2007).

Wakaf pada masa kejayaan Islam semakin berkembang pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah wakaf berkembang luas. Saat itu semua orang berduyun-duyung untuk mewakafkan hartanya. Wakaf menjadi luas karena peruntukannya tidak hanya untuk orang miskin namun hingga menjadi modal untuk pembangunan pendidikan, membangun perpustakaan, hingga memberikan beasiswa kepada siswa-siswinya. Antusiasme masyarakat pada masa pasca-Rasulullah menunjukkan solidaritas untuk membangun negara melalui wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2007)

Pada masa dinasti Umayyah mulai terbentuk lembaga wakaf tersendiri yang berada dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf yang pertamakali terbentuk ini menjadi lembaga wakaf yang pertama kali dilakukan secara administratif. Lembaga wakaf yang didirikan pada masa Umayyah menjadi lembaga wakaf administratif pertama di Mesir bahkan seluruh negara Islam. Hakim Taubah pada masa itu juga mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang bernama "Shadr al-wuquf". Lembaga wakaf *Shadr al-wuquf* juga mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Abbasiyah di mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf. Semua harta wakaf dikelola oleh Negara dan menjadi milik negara (*baitul maal*). Pada masa dinasti Abbasiyah pengelolaan wakaf lebih teratur dan juga berkembang pesat disbanding masa sebelumnya (Tabung Wakaf Indonesia, 2015).

Berdasarkan peruntukannya menurut Kementerian Agama Indonesia (2006), wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seperti keluarga *wakif* atau bukan. Peruntukan wakaf *ahli* masih dibatasi pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh *wakif*. Keberadaan wakaf *ahli* saat ini dinilai sudah tidak relevan. Wakaf *ahli* dinilai tidak relevan disebabkan tidak dapat memberikan manfaat secara umum.

Sedangkan wakaf *khairi* merupakan wakaf yang ditujukan sebagai kepentingan agama atau kepentingan masyarakat. Wakaf *khairi* tidak dibatasi peruntukannya seperti pada wakaf *ahli*. Wakaf *khairi* memungkinkan untuk digunakan sebagai institusi pembangunan masyarakat. Potensi yang dimiliki wakaf *khairi* sebagai sarana pembangunan dikarenakan peruntukannya yang lebih luas. Salah satu contoh pemanfaatan wakaf *khairi* adalah masjid, sekolah, rumah sakit, peternakan, dan masih banyak lagi.

Menurut Rida (2005) membagi wakaf berdasarkan batasan waktunya, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi merupakan wakaf yang bentuk bendanya bersifat abadi. Wakaf abadi juga dapat berupa benda bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif. Sebagian hasilnya ditujukan untuk wakaf dan sisanya sebagai biaya perawatan wakaf atau mengganti kerusakannya. Wakaf abadi dapat dikembangkan lebih luas mengingat tidak adanya batasan wak

Wakaf sementara adalah wakaf berupa benda yang mudah rusak ketika digunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara terjadi salah satunya dikarenakan adanya batasan waktu yang ditentukan *wakif* ketika mewakafkan harta bendanya.

Selain itu, menurut Asaf dalam Sari (2006) membagi wakaf kedalam tiga golongan. Golongan yang pertama adalah wakaf untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak membedakan keduanya. Sedangkan golongan yang kedua adalah wakaf untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang



Salah satu bentuk wakaf yang kini mulai banyak berkembang adalah wakaf tunai. Adanya wakaf tunai memungkinkan banyak pihak untuk mewakafkan harta bendanya. Wakaf tunai sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-16 masehi di mesir. Saat itu wakaf tunai pada masa Khalifah Utsman digunakan untuk pembangunan yang bersifat social dan keagamaan (Arif, 2010). Jenis wakaf ini dapat dikelola lebih lanjut untuk masyarakat.

Perlu adanya pengelolaan pada aset wakaf agar wakaf tunai dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan pengelolaannya wakaf dapat dikelola melalui dua jenis. Terdiri dari pengelolaan wakaf melalui aset non-produktif dan produktif. Menurut Al-Zuhaili (1997) definisi wakaf produktif merujuk pada pernyataan Imam Maliki mengenai wakaf yaitu mendayagunakan harta kekayaan atau aset yang dimiliki seseorang atau juga pendapatan yang dimiliki untuk mereka yang diperbolehkan sesuai dengan Al-Qur'an. Salah satu bentuk pemberdayaan wakaf produktif adalah melalui investasi wakaf tunai ke berbagai sektor untuk dimanfaatkan keuntungannya sesuai syariah.

Wakaf di Indonesia mulai dikenal dan dilaksanakan sejak masuknya agama Islam yang disebarkan oleh pedagang Cina dan Arab. Dimana pada saat itu ulama yang masuk menyebarkan agama Islam di Indonesia mengajarkan mengenai wakaf. Sehingga sejak itu dimulai penerapan wakaf dengan menyerahkan harta benda untuk kepentingan umat (Kementerian Agama Indonesia, 2006). Penerapan wakaf secara produktif di Indonesia dimulai pada tahun 2004. Dimana pada tahun 2004 telah diatur pula mengenai wakaf melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

**Tabel 1.1 Perolehan Wakaf Tunai di Indonesia Tahun 2008-2012
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Perolehan Wakaf
2008	61.378.050
2009	463.425.669
2010	745.716.967
2011	796.563.767
2012	566.277.039

Sumber : Badan Wakaf Indonesia, 2016.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia, apabila dilihat dari komposisi penduduk muslim di Indonesia. Berdasarkan data lain dari Kementerian Agama Indonesia menunjukkan tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 2016 mencapai 4.359.443.170 m². Sedangkan pendapatan wakaf tunai di Indonesia hingga tahun 2012 mencapai Rp 566.277.039,00 (Badan Wakaf Indonesia; dalam Huda, et al, 2017). Data mengenai wakaf dapat menjadi dasar bahwa wakaf di Indonesia masih perlu menjadi perhatian. Besarnya penduduk muslim di Indonesia harusnya mampu mendorong pencapaian wakaf untuk menjadi salah satu pendukung pembangunan.

Namun di Indonesia, wakaf masih memiliki berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan wakaf. Permasalahan yang terjadi pada wakaf berkaitan dengan sisi sumber daya manusia pengelola wakaf dan inovasi dalam pengelolaan wakaf hingga kurangnya pemahaman terhadap regulasi wakaf oleh pengelola wakaf (Huda, et al, 2017). Dari masalah yang terjadi pada institusi perwakafan di Indonesia menunjukkan bahwa masih perlunya pengembangan wakaf terutama pada sisi sumber daya manusianya. Pengelolaan terpadu pada wakaf tidak akan dapat tercapai tanpa adanya pembangunan sumber daya manusia.

Pengembangan dan perbaikan di sisi manajemen wakaf akan dapat tercapai jika sumber daya manusia atau *nazhir* memiliki kecakapan untuk mengelola wakaf.

Nazhir merupakan unsur penting dalam pengembangan wakaf. *Nazhir* adalah garda terdepan yang berperan dalam pengelolaan wakaf (Rozalinda, 2015). Inti dari keberhasilan pengembangan wakaf terdapat pada profesionalitas *nazhir*. Dengan kata lain, *nazhir* dapat dinyatakan sebagai manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan, hingga pendistribusian wakaf. *Wakif* dalam mewakafkan hartanya harus menunjuk *nazhir* untuk mengelola wakafnya. *Nazhir* tersebut dapat berasal dari pihak lain ataupun *wakif* itu sendiri yang berperan sebagai *nazhir*.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nazhir* dapat berbentuk perorangan, organisasi, maupun badan hukum. *Nazhir* perorangan merupakan sekelompok orang yang disyaratkan paling sedikit terdiri dari tiga orang. *Nazhir* perorangan ditunjuk oleh *wakif* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang wakaf. *Nazhir* perorangan harus didaftarkan pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama. Salah satu syarat yang harus dipenuhi *nazhir* perorangan adalah salah satu *nazhir* harus bertempat tinggal di kecamatan tempat aset wakaf berada.

Sedangkan *nazhir* berbentuk organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Bedanya, pada *nazhir* berbentuk organisasi harus terdapat akta notaris dan anggaran dasar. *Nazhir* organisasi juga harus terdaftar melalui Kantor Urusan Agama sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selain itu organisasi harus memiliki

program terpadu dalam pengembangan wakaf. Serta pengurus organisasi harus memenuhi syarat pada wakaf perorangan.

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. *Nazhir* badan hukum juga harus terdaftar di kementerian dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama. Salah syarat yang harus dipenuhi *nazhir* badan hukum adalah adanya kesedian untuk dilakukan audit. Syarat lain yang juga harus dipenuhi adalah harus terdapat program kerja dalam pengembangan wakaf. Selain itu, anggota pengurus juga harus memenuhi syarat sebagai *nazhir* perorangan.

Sebelum adanya lembaga *nazhir* profesional, bentuk pengelolaan wakaf hanya berupa kepercayaan *wakif* kepada seseorang. Pihak yang dipercayakan oleh *wakif* belum tentu memiliki syarat dan kecakapan sebagai *nazhir*. Kecakapan yang masih kurang menyebabkan pengelolaan wakaf masih belum maksimal. Bahkan terdapat berbagai kasus mengenai *nazhir* yang tidak amanah. Profesionalitas *nazhir* yang masih kurang menyebabkan aset wakaf banyak yang terbengkalai dan bermasalah. Perlu adanya *nazhir* yang cakap dan profesional agar aset wakaf dapat berkembang dan bermanfaat bagi umat (Muntaqo, 2015)

Melihat potensi dan masalah yang terjadi pada wakaf di Indonesia. Mulai berkembang lembaga *nazhir* wakaf profesional di Indonesia. Sejak tahun 2004 beberapa lembaga *nazhir* wakaf berdiri di Indonesia diantaranya Tabung Wakaf Indonesia, Lembaga Daarut Tauhid, *Baitul Maal* Muamalat, Lembaga Wakaf Ansor, dan beberapa lembaga lainnya. Selain dalam hal profesionalitas, perkembangan

nazhir wakaf terlihat dari pengelolaan wakaf yang dilakukan lembaga *nazhir*. Sejak diberlakukannya Undang-Undang mengenai wakaf, lembaga wakaf mulai berperan dalam pelaksanaan wakaf tunai. Penyaluran wakaf juga mulai berkembang saat mulai masuk periode ini. Hasil pengelolaan wakaf uang atau tunai dapat digunakan untuk kepentingan sosial seperti kesehatan, peningkatan pendidikan Islam, hingga pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2015).

Salah satu lembaga *nazhir* wakaf profesional yang telah berkembang di Indonesia adalah Lembaga Wakaf Ansor (LWA). LWA merupakan salah satu lembaga yang memiliki konsentrasi pada pengembangan wakaf produktif. Salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan oleh LWA adalah melalui pengelolaan wakaf pada sektor pertanian, peternakan dan sektor produktif lainnya. Pengembangan pada sektor produktif salah satunya pertanian merupakan bentuk konsistensi yang dilakukan LWA untuk mengembangkan wakaf produktif. Program wakaf pada pertanian yang dilakukan oleh LWA menjadi salah satu bentuk pengembangan wakaf yang diharapkan mampu memberikan manfaat dari sisi produksi hingga pada pasca produksi.

Lembaga Wakaf Ansor (LWA) adalah lembaga yang terbentuk atas inisiasi dan gagasan di bidang ekonomi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor). LWA dibentuk sebagai wadah pengembangan organisasi yang menjadi program baru di bidang ekonomi GP Ansor. Pembentukan LWA juga berupaya mencoba menggagas ide baru dalam perspektif pengembangan dan peningkatan aset wakaf yang belum maksimal menjadi lebih produktif. Alasan lain yang juga ikut mendorong upaya pengelolaan wakaf melalui LWA adalah terdapat aset wakaf di dalam internal Nahdhatul Ulama (NU) yang cukup besar dan belum dikelola secara

maksimal. Potensi dan permasalahan tersebut mendasari GP Ansor untuk perlu mengambil bagian dalam peningkatan produktifitas pemberian *wakif* kepada NU secara khusus dan wakaf Indonesia secara umum. (Lembaga Wakaf Ansor, 2017)

Pola pengelolaan wakaf pada umumnya di Indonesia sendiri masih berkisar menjadi masjid. Pengelolaan wakaf di Indonesia mulai beralih menjadi produktif salah satunya Masjid Pondok Indah Jakarta. Pengembangan wakaf produktif dilakukan melalui pembangunan gedung pernikahan atau pertemuan hingga toko dari area pekarangan masjid. Hasil dari penjualan di toko dan penyewaan fasilitas tambahan akan digunakan sebagai pembiayaan operasional masjid dan pengembangan pendidikan. Salah satu bentuk contohnya juga terdapat di Pondok Pesantren As-Salam Gontor (Rozalinda, 2015).

LWA sebagai salah satu lembaga *nazhir* berfokus dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Bidang yang menjadi fokus pengelolaan wakaf produktif LWA diantaranya pertanian, peternakan, perdagangan, dan perkebunan. Salah satu bentuk program pengelolaan produktif yang dilakukan oleh LWA adalah pengelolaan wakaf produktif ubi . Tujuan utama program wakaf produktif melalui penanaman ubi adalah untuk memberdayakan aset wakaf agar menjadi produktif dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas. Pembudidayaan ubi jalar yang dilakukan oleh LWA sudah berlangsung sejak tahun 2017.

Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki jumlah konsumsi cukup besar di Indonesia. Kondisi iklim dan tanah di Indonesia juga memiliki unsur yang dapat mendukung pertumbuhan ubi. Namun belum sepenuhnya hasil produksi ubi yang ada di Indonesia terdistribusi secara maksimal. Salah satu

kendala yang dialami adalah pemasaran. Kendala tersebut disebabkan masih tingginya konsumsi beras dibanding komoditas pokok lainnya.

Tabel 1.2 Konsumsi Nasional Komoditas Ubi Jalar Tahun 2010 - 2015

Tahun	Konsumsi Nasional (Ton)	Pertumbuhan (%)
2010	1.776.965	-1,22
2011	1.926.246	8,40
2012	2.176.922	13,01
2013	2.092.560	-3,88
2014	2.087.925	-0,22
2015	2.137.725	2,39

Sumber : Kementerian Pertanian, 2016.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi ubi jalar secara nasional mengalami fluktuasi. Perkembangan konsumsi yang fluktuatif menunjukkan bahwa ubi jalar memiliki potensi yang besar untuk dibudidayakan di Indonesia. Perkembangan dari konsumsi nasional terhadap komoditas ubi jalar menjadi peluang ekonomi untuk komoditas tersebut dikembangkan. Ubi selain memiliki nilai gizi yang tinggi namun juga menjadi salah satu jenis komoditas yang memiliki permintaan cukup tinggi. Permintaan yang tinggi disebabkan karena ubi jalar merupakan salah satu komoditas pangan pokok yang dikenal masyarakat selain beras.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, menunjukkan bahwa ubi jalar memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Korea Selatan dan Jepang merupakan salah satu negara tujuan ekspor ubi jalar Indonesia dengan nilai ekspor yang cukup tinggi. Nilai ekspor ubi jalar ke Korea Selatan pada tahun 2014 mencapai 8,3 juta Dolar Amerika. Pada tahun 2015 nilai ekspor ubi jalar ke Korea Selatan mengalami peningkatan yaitu 4,6 juta Dolar Amerika. Sedangkan ekspor ubi jalar ke Jepang

pada tahun 2014 senilai 4,1 Juta Dolar Amerika dan mengalami peningkatan mencapai nilai 4,2 Juta Dolar Amerika. Berdasarkan pada perkembangan nilai ekspor yang diatas menunjukkan bahwa potensi ekonomi komoditas ubi jalar cukup besar. Potensi yang cukup besar pada ekspor ubi jalar, menjadi peluang pula bagi ubi jepang dan ubi cilembu yang menjadi komoditas pertanian di LWA sebagai salah satu jenis ubi jalar untuk memberikan sumbangsih pada perekonomian di sektor pertanian.

Tabel 1.3 Data Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia pada Komoditas Ubi Jalar Tahun 2014-2015

Negara Tujuan	Tahun 2014	Tahun 2015
Republik Korea Selatan	2462	4614
Jepang	4096	4221
Singapura	664	1207
Malaysia	869	829
Thailand	41	285
Hongkong, Cina	157	281
Cina	82	43
Uni Emirat Arab	-	3
Bahrain	-	1
Qatar	-	1

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2015.

LWA dalam menjalankan program pengelolaan wakaf produktif pertanian ubi, melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan Korea yaitu PT Indowooyang dan juga Pondok Pesantren. Kerjasama antara LWA dengan Perusahaan adalah distribusi pasca panen. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan lahan akan pertanian ubi, LWA melakukan kemitraan dengan Pondok Pesantren. Kemitraan yang dilakukan oleh LWA dengan pondok pesantren selain memenuhi kebutuhan lahan, namun juga untuk memberdayakan lahan wakaf pesantren dan perekonomian



Seperti yang terlihat pada gambar 1.2 bahwa lahan yang dimiliki oleh pesantren merupakan lahan yang memiliki karakteristik kemiringan. Pihak pesantren bekerjasama dengan LWA untuk dapat mengelola lahan yang dimiliki menjadi lebih efektif. Asimetri informasi yang dialami pesantren akan pemanfaatan lahan menjadi peluang bagi LWA sebagai lembaga *nazhir* untuk berperan memberdayakan lahan wakaf pesantren agar lahan menjadi produktif. Salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan adalah dengan menggunakan media penanaman ubi pada lahan pesantren.

Pondok Pesantren sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang mengakar di dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dari sosiokultural masyarakat. Sebagai bagian sosiokultural masyarakat, pondok pesantren memiliki peluang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Lokasi pesantren yang sebagian besar berada di daerah pedesaan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, konsep agribisnis menjadi salah satu sarana yang diharapkan sesuai untuk pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Konsep agribisnis sebagai suatu sistem akan memberikan nilai tambah melalui kegiatan-kegiatan sub-sistem yang ada di dalamnya.

Upaya kerjasama yang dilakukan lembaga wakaf ansor dengan pihak pesantren merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi dan membangun kemandirian ekonomi pesantren. Adanya kemandirian ekonomi yang dirasakan oleh pesantren akan berdampak pada kesejahteraan. Definisi kesejahteraan menurut Badrudin (2012) adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Keadaan masyarakat pada masa itu akan menjadi penentu kesejahteraan berdasarkan pada standar kehidupan yang berlaku. Kesejahteraan menurut Nasikun (1996) dapat didefinisikan sebagai padananan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri.

Sedangkan menurut World Bank (2002) menyatakan bahwa indikator kesejahteraan pada masyarakat merupakan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator kesejahteraan tersebut disebut dengan *Millenials Development Goals* (MDG's). Salah satu diantara indikator pencapaian pembangunan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penghapusan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan dapat tercapai melalui upaya pemberdayaan ekonomi. Upaya pemberdayaan ekonomi melalui program kerjasama dengan pesantren menjadi salah satu upaya mencapai kesejahteraan.

Selama masa penanaman ubi pada lahan wakaf, LWA dibantu oleh pihak profesional yang memiliki keahlian dalam teknologi pertanian. Pihak profesional yang terlibat dalam proses teknis pertanian adalah pihak agronomi yang merupakan relasi dari pihak internal GP Ansor. Tim agronomi di dalam teknis pembudidayaan ubi membantu memberikan edukasi kepada santri. Edukasi yang diberikan oleh tim agronomi adalah berupa teknis bercocok tanam secara efisien dan benar. Peran santri selama proses edukasi adalah mereka dapat melihat dan memantau proses awal hingga akhir secara langsung di lahan pertanian.

Adanya edukasi yang diberikan oleh pihak GP Ansor melalui tim agronomi kepada santri diharapkan mampu memberikan keahlian baru mengenai teknis

bercocok tanam. Upaya edukasi yang diberikan kepada santri sejalan dengan visi yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal A'mal untuk mencetak insan mandiri dan beraqidah. Pendidikan yang diberikan oleh pesantren kepada santri memiliki tujuan untuk membentuk jiwa wirausaha dan memiliki pengetahuan agama kepada santri. Santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan anak-anak dengan latar belakang yatim dan berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Kemitraan yang dilakukan antara pihak pesantren dengan lembaga wakaf diharapkan menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Disisi lain dari adanya kemitraan tersebut akan mendorong upaya pemanfaatan aset wakaf menjadi produktif dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Upaya pemberdayaan ekonomi melalui kemitraan tersebut akan menunjukkan bahwa wakaf berpotensi menjadi sarana dalam kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu adanya pengelolaan wakaf produktif yang memanfaatkan lahan pondok pesantren akan memberikan pengetahuan baru bagi para santri untuk mampu membekali dirinya secara ekonomi.

Penelitian ini berfokus pada pola kelola wakaf sebagai salah satu instrumen alternatif dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Program wakaf pada pertanian ubi yang dilakukan oleh LWA merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pembudidayaan ubi yang berasal dari lahan wakaf dan kemitraan dengan pondok pesantren sebagai penyedia lahan. Pada penelitian akan memaparkan pola pengelolaan wakaf produktif melalui pertanian ubi. Selain menelaah pola pengelolaan wakaf pada pertanian, penelitian

ini juga berfokus untuk memaparkan upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui wakaf produktif pertanian ubi.

Dari pemaparan diatas penulis mencoba menelaah melalui sebuah penelitian berjudul **“Pola Kelola Wakaf dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi pada Wakaf Produktif Pertanian Ubi Lembaga Wakaf Ansor)”**. Penelitian ini menganalisa pola kelola penerapan wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi. Serta bagaimana wakaf produktif pertanian ubi mampu menjadi upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pembahasan permasalahan difokuskan pada pola kelola wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren studi pada Lembaga Wakaf Ansor. Atas dasar itulah, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian dalam tulisan ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kelola wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor?
2. Bagaimana peranan wakaf produktif pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pola kelola wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor.

2. Untuk mengetahui peran wakaf produktif ubi pada lembaga wakaf ansor dalam rangka pemberdayaan ekonomi pesantren.

1.4 Manfaat

Melalui penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritik yaitu dapat digunakan sebagai informasi atau kontribusi baru bagi pengembangan wakaf produktif.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan pertimbangan terhadap pengelolaan wakaf produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Wakaf dalam Komponen Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu komponen dalam Ekonomi Islam yang memiliki potensi dalam pembangunan masyarakat. Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang berbeda jika dibandingkan dengan zakat maupun infaq. Wakaf dapat berpotensi menjadi salah satu aset abadi yang jika dikembangkan secara produktif akan mampu berperan dalam mengatasi problematika di dalam masyarakat.

2.1.1 Definisi Wakaf

Menurut Muhammad Al-Khatib dalam Saadati (2016) mengemukakan bahwa wakaf diambil dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Secara harfiah bermakna "pembatasan" atau "larangan". Kata *waqf* digunakan dalam islam untuk maksud pemeliharaan dan pemilikan. Definisi wakaf secara terminologi, wakaf diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (*tahbisul ashi*), lalu menjadi menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksud dari *tahbisul ashi* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan (*waqif*). Sedangkan menurut Fauzia dan Hermawan (2003) wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin

untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Definisi wakaf menurut Ulama Hanafiyah dirumuskan sebagai menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah *waqif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti *dirham* (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *waqif*.

Pendapat kedua ulama menunjukkan bahwa keduanya berpendapat bahwa wakaf memiliki akad yang tidak mengikat dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Sehingga pada keadaan ini *waqif* hanya melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkannya. Menurut Abu Hanifah wakaf dapat bersifat mengikat dalam keadaan : (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukan wakaf adalah untuk masjid, (3) Wakaf itu dikaitkan dengan kematian *waqif* (*waqif* berwasiat mewakafkan hartanya).

Sedangkan menurut mayoritas ulama dari kalangan syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan pendapat ulama mayoritas menjelaskan bahwa wakaf memiliki akad yang bersifat mengikat (*luzum*). Pengertian dari ulama mayoritas mendefinisikan bahwa *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan. *Waqif* juga

tidak diperbolehkan untuk menjual maupun mewariskannya. Harta yang sudah diwakafkan, menurut mayoritas ulama telah menjadi milik Allah sehingga tidak menjadi milik *waqif*. Perpindahan kepemilikan memiliki tujuan untuk digunakan sebagai kebaikan umat Islam (Rozalinda, 2015).

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum mengenai wakaf telah dijelaskan melalui ayat Al-Qur'an, hadits, hingga Undang-Undang yang mengatur wakaf. Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an sendiri secara jelas tidak menyatakan mengenai wakaf, namun terdapat ayat yang menjadi dasar penjas mengenai wakaf. Salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai wakaf yaitu Surat Ali Imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran/3:92).

Sedangkan berdasarkan Undang-undang juga telah diatur mengenai wakaf sebagai landasan hukum harta wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menyatakan secara resmi mengenai perlindungan terhadap harta wakaf. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai wakaf diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tentang wakaf menjadi penyempurna dari peraturan mengenai wakaf sebelumnya. Selain menjadi penyempurna, undang-undang wakaf juga menambahkan hal-hal baru diantaranya upaya memberdayakan

wakaf secara produktif dan akuntabel. Undang-Undang wakaf juga mengatur tentang wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak.

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun wakaf dan syarat wakaf.

Rukun wakaf terdiri dari empat rukun wakaf yaitu diantaranya :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan).
- 2) *Mauquf* (barang yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
- 4) *Shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya) (Faisal dan A. Saiful, 1993).

Di dalam rukun wakaf sendiri terdapat syarat yang penting agar wakaf dapat dinyatakan sah. Adapun syarat sah wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat *Waqif* (Orang yang mewakafkan)

Adapun syarat *waqif* menurut penetapan ulama adalah sebagai berikut :

- a) Berakal yaitu mempunyai akal, maka tidaklah sah apabila wakaf diberikan oleh orang gila.
- b) Dewasa (*baligh*), tidak sah apabila yang mewakafkan adalah dibawah umur.
- c) Tidak dalam gangguan.
- d) Kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan pihak manapun.
- e) Merdeka. (Al Kabisi, 2004).

- 2) Syarat *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)

Ulama menyepakati bahwa harta dan benda yang diwakafkan harus konkrit dan pasti, diketahui, dan betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkan. Menurut Madzhab Hanafi, syarat barang yang diwakafkan itu ada empat macam yaitu :

- a) Barang yang diwakafkan itu harus berupa harta benda, tidak boleh mewakafkan manfaat semata tanpa bendanya, juga tidak boleh mewakafkan suatu harta yang tidak baik menurut syara', seperti barang-barang yang memabukkan dan kitab-kitab yang menyesatkan.
 - b) Barang yang diwakafkan harus jelas, baik kejelasan ukuran, seperti mewakafkan 100m tanah maupun lainnya.
 - c) Barang yang diwakafkan tersebut adalah betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkannya.
 - d) Barang yang diwakafkan itu harus sudah dibagi, tidak sebagai kongsi dengan orang lain jika memang barang itu dapat dibagi.
- 3) Syarat *Mauquf' Alaih* (sasaran atau penerima wakaf)

Menurut ulama beberapa syarat yang ada didalam *mauquf'alaih* juga perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan syara', tidak dibatasi waktu, dan sesuatu yang tidak menimbulkan *mudharat* pada ahli warisnya. Berikut adalah syarat *mauquf'alaih* yang harus dipenuhi :

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
- c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada *waqif*.

- d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

4) Syarat *sighat* wakaf

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *sighat* yang ada di dalam wakaf adalah sebagai berikut :

- a) *Ta'bid*, yaitu *waqif* harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu.
- b) *Ilzam*, yaitu tidak ditautkan pada suatu *khiyar*, seperti mensyaratkan di waktu tertentu harus mengembalikan harta wakaf kepada *waqif* apabila ia membutuhkannya.
- c) *Sighat* tidak terkait dengan persyaratan *bathil* seperti seseorang mensyaratkan sebagai benefit wakafnya untuk perbuatan maksiat.
- d) Jumhur ulama selain Imam Maliki menyatakan *sighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai (Al-Zuhaili dalam Juhanda, 2011).

2.1.4 Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi ke dalam berbagai macam jenis di dalamnya. Berdasarkan pada bentuk manajemennya wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu (1) wakaf yang dikelola oleh *waqif* sendiri atau salah satu keturunannya atau disebut juga dengan wakaf *ahli*, (2) wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk langsung oleh *waqif* misalnya imam masjid, yayasan sosial, badan hukum, (3) wakaf yang dikembalikan kepada satu lembaga pemerintah tertentu karena kehilangan surat atau sudah berumur puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Wakaf berdasarkan jenis barangnya terbagi menjadi dua macam diantaranya yaitu (1) harta bergerak, seperti kendaraan, hewan, perlengkapan rumah ibadah (sajadah, karpet, dan lain-lain), (2) harta tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, pohon, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain. Sedangkan wakaf berdasarkan bentuk hukumnya terbagi menjadi 4 kategori, yaitu : umum, khusus (keluarga), wakaf gabungan di mana hasilnya dibagi dua (untuk keluarga wakif dan masyarakat banyak), wakaf abadi, wakaf sementara (hak guna pakai atau guna bangun) (Kementerian Agama, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan jenis hartanya/bendanya wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Wakaf benda bergerak : harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi (1). Uang, (2). Logam mulia, (3). Surat berharga, (4). Kendaraan, (5). Hak atas kekayaan intelektual, (6). Hak sewa dan (7).
- 2) Wakaf benda tidak bergerak : harta benda wakaf yang berupa benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

a) Wakaf Tunai

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf terbagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis harta/benda wakaf tersebut diantaranya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Salah satu bentuk wakaf pada benda bergerak adalah uang atau wakaf tunai. Wakaf tunai sendiri adalah wakaf

yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya (Kementerian Agama, 2006). Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2002), menyebutkan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Definisi berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga berlaku untuk surat-surat berharga.

Di dalam praktiknya wakaf tunai memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan sah. Adapun rukun wakaf tunai sendiri adalah harus dipenuhinya syarat terlaksananya wakaf tunai. Diantaranya syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf tunai adalah :

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, wakaf harus disebutkan secara jelas ditujukan kepada siapa.
- 4) Wakaf harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh dibatalkan. (Usman, 2009).

b) Wakaf Lahan

Wakaf lahan merupakan salah satu bentuk wakaf pada benda tidak bergerak. Wakaf pada lahan atau hak milik tanah menurut Harsono (2003) adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan

melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf yang diperuntukkan sebagai kepentingan umum sesuai ajaran Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam wakaf lahan atau tanah hak milik, diantaranya adalah :

- 1) *Waqif* : Wakif bisa berupa orang per orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, ataupun badan hukum yang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Dengan demikian, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum yang bukan subjek Hak Milik tidak dapat berkedudukan sebagai wakif.
- 2) *Nazhir* : Nadzir atau nazhir bisa berupa perseorangan atau badan hukum.
- 3) Tanah yang diwakafkan : Di dalam wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selama-lamanya, maka tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus Hak Milik sebab sifat tanah Hak Milik adalah turun temurun, artinya tanah Hak Milik tidak mempunyai batas jangka waktu tertentu.
- 4) Ikrar wakaf : pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) : pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf.
- 6) Penggunaan tanah wakaf : Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya dipergunakan untuk kepentingan peribadatan dan atau kepentingan sosial lainnya, misalnya gedung pendidikan, gedung panti asuhan, gedung kesehatan.

2.2 Pola Kelola Wakaf menurut Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf berdasarkan penjelasan dari Imam Maliki adalah memanfaatkan harta atau benda yang dimiliki oleh pemilik benda (*waqif*) baik yang menghasilkan pendapatan seperti dirham ataupun yang tidak menghasilkan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan penjelasan Imam Maliki menunjukkan bahwa wakaf produktif adalah salah satu upaya untuk menggunakan manfaat dari suatu harta wakaf. Pendapat dari Imam Maliki mendukung bahwa wakaf harus dikelola secara produktif agar relevan dan tidak boleh menghilangkan karakter kekekalan wakaf (Al-Zuhaili, 1997).

Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai perpindahan bentuk dari wakaf yang bersifat tunai kedalam bentuk investasi produktif. Investasi dalam sektor produktif akan memberikan manfaat yang lebih luas. Manfaat lain juga dapat dirasakan untuk pembangunan dan kebermanfaat publik secara berlanjut. Wakaf juga berarti adanya keseimbangan antara investasi dan simpanan untuk kebermanfaatan publik di masa depan. Menurut Zarka dalam Huda dan Haykal (2010), secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan.

Wakaf produktif perlu dikelola dengan benar dan berkala agar tetap dapat menjaga karakteristiknya secara berkelanjutan. Manajemen wakaf produktif merupakan unsur penting agar wakaf produktif senantiasa memberikan kebermanfaat bagi masyarakat. Manajemen wakaf produktif juga diperlukan untuk

memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari setiap pilihan pengelolaan wakaf. Selain itu, manajemen pengelolaan wakaf diperlukan untuk melindungi keberadaan wakaf dan hasil dari pengelolaan wakaf dari beberapa hal yang ada didalamnya diantaranya adalah :

- 1) Efek "*Good Deed*" : Manajemen wakaf harus mengarah kepada kebermanfaatan yang lebih besar. Tidak hanya memberdayakan tapi juga mempertimbangkan dampaknya.
- 2) Efek "*Free Rider*" : Hal ini terjadi saat nilai asli dari aset yang diwakafkan menjadi berkurang saat dimanfaatkan.
- 3) Efek "*Income Redistribution*" : Manajemen wakaf harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan operasionalisasi dalam upaya mencapai distribusi pendapatan yang signifikan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

2.3 Teori Kontrak dan Asimetris Informasi

Pendekatan dalam ilmu ekonomi terdapat suatu biaya transaksi yang di dalamnya juga terdapat basis unit analisis yaitu kontrak. Menurut Dixit (1996) kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain yang tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan. Bentuk penegakan kontrak dalam asumsi ekonomi kelembagaan dapat dipaksakan melalui koridor lembaga hukum legal yang mengatur kontrak dan ketersediaan informasi yang cukup. Asumsi penegakan kontrak tersebut muncul karena pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak memiliki derajat kesukarelaan yang berbeda dalam menyetujui isi kontrak yang dibuat, sehingga penegakan kontrak dapat dilakukan melalui lembaga hukum legal.

Menurut teori neoklasik, kontrak biasanya diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Konsep kontrak dalam cabang ilmu ekonomi yaitu ekonomi kelembagaan menurut Birner (dalam Yustika, 2012) sebenarnya berkaitan dengan konsep hak kepemilikan. Asumsi yang mendasari konsep tersebut adalah masing-masing dari jenis dari pertukaran hak kepemilikan dapat dimodelkan sebagai transaksi yang mengatur kontrak.

Kontrak dalam kegiatan ekonomi modern menurut Furubotn dan Richter (2000) dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yakni teori kontrak agen (*agency contract theory*), teori kesepakatan otomatis (*self-enforcing agreements theory*), dan teori kontrak-relasional (*relational contract theory*). Pertama, pada teori prinsipal terdapat setidaknya dua pelaku yang berhubungan yakni principal (*principal*) dan agen (*agent*). Principal adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan principal. Sedangkan agen memiliki peran sebagai pelaksana pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh principal.

Kedua, jika dalam teori kontrak agensi diasumsikan kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum, maka dalam teori kesepakatan otomatis diandaikan tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Pada konsep ini adanya kontrak yang dibuat oleh relasi bisnis secara jangka panjang untuk memastikan bahwa keuntungan dari berbuat curang selalu lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh dengan mematuhi kontrak yang telah disepakati. Pihak ketiga pada posisi ini tidak mampu melakukan intervensi terhadap kontrak kedua belah pihak.

Ketiga, kontrak relasional dapat dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di masa silam. Kontrak dalam pengertian ini mengacu kepada derajat yang bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Penegakan otomatis (*self-enforcement*) pada keadaan ini memiliki peranan yang penting. Persoalan yang mungkin timbul pada tingkatan kontrak ini biasanya tidak diselesaikan melalui pengadilan namun dicapai keseimbangan kerjasama, paksaan, serta komunikasi dan strategi. Kontrak relasional diterapkan dalam kondisi dan situasi dimana terdapat ketergantungan dua pihak (*bilateral dependence*) pelaku transaksi karena eksistensi dari interaksi investasi yang spesifik.

Menard (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kesepakatan kontrak yang telah teruji lama, yakni kontrak harga tetap (*fixed-price contract*), kontrak jual-beli (*buy-and-sell contracts*), dan kontrak lepas (*putting-out type*). Tipe kontrak lepas pada penelitian Menard merupakan kontrak yang paling banyak dipilih saat itu. Dalam jangka panjang kontrak-kontrak yang ditemukan oleh Menard akan tetap bertahan, meskipun dimungkinkan munculnya jenis kontrak baru seiring berkembangnya kegiatan ekonomi.

2.4 Hak Kepemilikan

Teori ekonomi klasik mengasumsikan hak kepemilikan ditetapkan kepada individu berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi (*private ownership*). Sanksi atas kepemilikan dapat dipindahkan (*transferable*) melalui izin berdasar prinsip kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan konsep yang diperoleh melalui asumsi klasik, hak kepemilikan dimengerti sebagai hak untuk menggunakan,

mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset, atau beberapa hak yang diinginkan (Yustika, 2012).

Bromley dan Carnea (1989) mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak yang lain peduli dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Definisi hak kepemilikan memperjelas makna bahwa hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset yang juga mencakup di dalamnya hak menggunakan dan memindahkann atas aset yang dimiliki atau dikuasai. Kepemilikan yang dimaksud pada definisi tersebut bisa berupa kepemilikan fisik seperti tanah dan kepemilikan yang tidak terlihat seperti faktor-faktor produksi.

Eksistensi hak kepemilikan dapat dijelaskan lebih luas melalui dua pendekatan yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial. Pertama, teori kepemilikan individu merupakan gambaran dari prinsip hak-hak alamiah yang merupakan basis dari ekonomi klasik dan mengarah pada pandangan individualistik. Kedua, teori hak kepemilikan sosial berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan-keterbatasan alamiah yang inheren dalam diri manusia (Furubotn dan Richter, 2000).

Caporaso dan Levine (1992) memiliki pandangan lain dalam menjelaskan hak kepemilikan melalui dua teori yang merupakan respon yang berlainan dari asumsi bahwa hak-hak kepemilikan merupakan suatu bentuk politik. Pertama, aliran positivis berargumentasi bahwa hak-hak diciptakan melalui sistem politik. Hak-hak berasal dari sistem yang mendesainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum. Kedua, aliran hak alamiah yang berargumetasi

bahwa seseorang sejak lahir telah memiliki hak yang kadangkala merujuk kepada hak-hak yang tidak bisa disingkirkan. Aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum sementara aliran hak-hak alamiah menggali hak-hak tersebut dari sisi luar hukum.

Menurut Tietenberg (1992), dalam menjelaskan kerangka konsep hak kepemilikan mengidentifikasikan empat karakteristik penting dari hak kepemilikan diantaranya:

- 1) Universalitas (*universality*): seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
- 2) Eksklusivitas (*exclusivity*): seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung (*directly*) maupun tidak langsung (*indirectly*) melalui penjualan atau yang lain.
- 3) Transferabilitas (*transferability*): seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan (ditransfer) dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela.
- 4) Enforsibilitas (*enforceability*): hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain.

Pada akhirnya menurut Yustika (2012) memilah jenis-jenis hak kepemilikan yang eksis pada masyarakat menjadi tiga jenis diataranya hak kepemilikan individu, hak kepemilikan negara, dan hak kepemilikan komunal. Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki

aset spesifik yang diinginkan. Hak kepemilikan individu menjelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh keuntungan, entah dengan cara diolah atau dijual kembali. Hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik hanya diperbolehkan menjadi milik negara sehingga individu atau pribadi tidak diperkenankan memilikinya. Sementara hak kepemilikan komunal, merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik (*well-defined group*) dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat dalam Dimensi Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2006) kesejahteraan menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. *Kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Untuk mendefinisikan kesejahteraan menurut Stiglitz (2011) terdapat multidimensi yang harus digunakan. Dimensi tersebut termasuk standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Dalam mencapai kesejahteraan terdapat kriteria ekonomi yang harus dipenuhi diantaranya

- 1) Kriteria Bentham : menurut kriteria ini perbaikan kesejahteraan akan terjadi apabila tersedia barang-barang dalam jumlah semakin banyak. Dengan artian bahwa *welfare* total adalah penjumlahan *utility* dari individu-individu dalam masyarakat. Kriteria ini juga mengasumsikan adanya komparasi antarindividual diantara masyarakat yang menikmati manfaat dengan anggota masyarakat yang menderita kerugian akibat adanya perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Kriteria Cardinal : menurut kriteria ini berpendapat bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap *utility*. Dalam kriteria ini berlaku *Law of Deminishing Marginal Utility*, anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi akan memperoleh *marginal utility* yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga dalam kriteria ini menganggap harus terdapat distribusi pendapatan dalam masyarakat agar *marginal utility* setiap anggota masyarakat akan sama.
- 3) Kriteria Pareto-Optimal : menurut teori ini berpendapat bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila mungkin dilakukan lagi re-organisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak merasa lebih sejahtera.
- 4) Kriteria Kaldor-Hicks : Menurut Kaldor Hicks kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan membantu orang lain yang dirugikan sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang lain yang bertambah kaya.
- 5) Kriteria Ganda Scitovsky : kriteria ini merupakan kritik dari pendapat Kaldor-Hicks. Negara menurut Scitovsky harus menyediakan jasa-jasa yang bermanfaat bagi masyarakat secara kolektif.

- 6) Kriteria Bergson : Bergson berpendapat dalam kriteria ini berpendapat bahwa penilaian tentang perubahan hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial, yang menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung pada kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menyatakan dalam bentuk yang tepat pertimbangan nilai yang diperlukan untuk derivasi kondisi kesejahteraan ekonomi maksimal.

2.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Islam

Berkembangnya konsep pembangunan secara *top-down* selama ini masih banyak terkesan tersentralisasi dan menimbulkan banyak pertanyaan. Pembangunan yang telah dilakukan apakah telah memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang merupakan objek pembangunan hanya dianggap awam, sedangkan masyarakat sendirilah yang lebih memahami seluk beluk kehidupan dan kebutuhan yang mereka miliki. Salah satu kritik pembangunan yang diutarakan oleh Mulyono dan Djohani (1996) adalah selama ini cara yang didasari suatu keyakinan bahwa penyelesaian persoalan hanya bisa ditangani oleh kaum profesional. Sementara masyarakat hanya dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan masalah atau justru dianggap bagian dari masalah.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek namun juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan yang sebenarnya adalah terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses pemberdayaan melihat pentingnya proses pemberdayaan dalam melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang bermula sebagai obyek menjadi subyek.

Pendapat lain dari Sugarto (2005) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pada penjelasan konseptual pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Kemampuan yang dimaksud adalah pada khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan, (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah atau rentan.

Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sugarto, pengertian pemberdayaan juga diungkapkan oleh Priyono dan Pranarka (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, yang memiliki arti memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Pengertian kedua memiliki arti memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan susasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika pemberdayaan menurut Winarni tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki daya, namun daya yang dimiliki masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya yang dimiliki perlu digali dan dikembangkan, serta proses pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Salah satu bentuk proses kemandirian dalam upaya pemberdayaan adalah melalui pengembangan di bidang ekonomi. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar atau nilai tambah yang tinggi. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada

perbaikan akses terhadap empat hal yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan ekonomi menurut pendapat Hutomo (2000) adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan multiaspek baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" yang berarti "*kekuasaan*" atau "*keberdayaan*". Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan, (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah atau rentan.

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi (Suharto, 2005)

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik (Ismail, 2008). Pada pernyataan Jim Ife menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah bentuk upaya peningkatan kapasitas suatu masyarakat menuju masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Salah satu upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja (Hutomo, 2000).

Islam juga memiliki pandangan dalam konsep pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting, sehingga pemberdayaan dalam

pandangan Islam memiliki pendekatan-pendekatan yang holistic dan strategis. Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Dalam Al-Qur'an tentang pemberdayaan *dhu'afa*, pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Ismail, 2008).

Pemberdayaan masyarakat di dalam Islam menurut Agus Efendi dalam Syafi'i dan Machendrawaty (2006) menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah, pemberdayaan pertama diperlukan karena terjadinya degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Keadaan masyarakat Islam masa kini diperparah oleh gagalnya pendidikan agama Islam di hampir semua pendidikan. *Kedua*, pemberdayaan intelektual. Pemberdayaan intelektual diperlukan karena umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan kemiskinan yang masih banyak dialami umat Islam.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2012) dengan judul "Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu, Siattinge Kabupaten Bone" menunjukkan bahwa di Kecamatan Tellu telah terdapat

bentuk pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Tanah wakaf di Kecamatan Tellu dikelola secara produktif berupa persawahan yang dikelola oleh Imam desa setempat. Tanah wakaf produktif di Kecamatan Tellu Siattinge belum memberikan kontribusi yang maksimal sebagai sumber ekonomi umat. Kontribusi tanah wakaf produktif dapat dilihat dari pendapatan Imam desa yaitu sebesar 3,95% kontribusi tanah wakaf terhadap pendapatan Imam desa dan melalui pengeluaran rata-rata perkapita sebulan keluarga Imam Desa sebesar 14,12%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Kec. Tellu Siattinge adalah pengelolaan tanah wakaf yang masih tradisional, sengketa status tanah wakaf, kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari pemukiman masyarakat, tujuan wakaf, nadzir yang kurang berkompeten, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf produktif.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2016) dengan judul "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone" menunjukkan hasil bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki fungsi ganda yaitu Pertama, pada pesantren, mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya. Selain itu berfungsi juga untuk masyarakat berupa beasiswa, kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan bantuan pemberian pupuk organik.

Namun, kenyatannya terdapat hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan kurangnya perhatian

pemerintah terhadap lembaga wakaf. Sebagai upayanya yaitu sosialisasi tentang wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, dan terbentuknya forum nazir.

Pada penelitian yang dilakukan di Nigeria oleh Amuda, et al (2014) menunjukkan bahwa institusi wakaf dapat berperan mengatasi krisis pertanian di Nigeria. Wakaf mampu mendukung perbaikan sektor pertanian di Nigeria melalui transfer modal wakaf. Selain itu institusi wakaf juga mampu berpotensi untuk menjalin kerjasama antar bangsa melalui transfer wakaf. Salah satunya adalah Malaysia dengan Nigeria.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2017) juga menunjukkan bahwa konsep *muzara'ah* atau wakaf mampu mendukung penerapan pada pertanian. Melalui konsep wakaf, akan timbul kesepakatan antara petani dengan pemerintah. Keduanya melakukan kesepakatan atas pengelolaan pertanian dari tanah wakaf. Hasil panen akan dikelola oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani.

Penelitian lain juga dilakukan di Malaysia dalam mengatasi kebutuhan lahan pertanian di Malaysia. Hasil penelitian dari Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, et al (2015) menunjukkan bahwa wakaf di Malaysia memiliki potensi untuk mampu menjawab permasalahan kebutuhan tanah kosong untuk lahan pertanian. Wakaf mampu berperan dalam penyediaan tanah kosong dan mengatasi permasalahan administrasi yang dialami petani di Malaysia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
Syaakir Sofyan, (2012)	Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu, Siattinge Kabupaten Bone	Mengetahui bentuk pengelolaan wakaf di Kecamatan Tellu dan kontribusi wakaf pada perekonomian masyarakat	Kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan penelaahan dokumen	Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tellu Siattinge adalah berupa persawahan yang dikelola oleh Imam Desa setempat. Hasil dari tanah tersebut yang berupa padi, sebagai upah/imbalan kepada imam desa yang telah mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, yang oleh masyarakat disebut <i>akkinanrengenna imangnge</i> . Tanah wakaf produktif di Kecamatan Tellu Siattinge belum memberikan kontribusi yang maksimal sebagai sumber ekonomi umat.
Hardianti Yusuf, (2016)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.	Menjelaskan pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak dan pemanfaatannya dalam pemberdayaan ekonomi	Kualitatif dengan pendekatan penelitian secara historis, sosiologis, etika bisnis Islam, dan manajemen.	Pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki fungsi ganda yaitu pada pesantren, mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya.

Nama dan Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
Yusuff J Amuda, Azizan C. Embi, and Oladapo H. Babatunde, (2014).	An Agricultural Approach to the Commercialization of Cash Waqf between Malaysia and Nigeria	Menguji kemungkinan adanya transfer pembiayaan dari institusi wakaf di Malaysia kepada Nigeria.	Metode pendekatan kualitatif dan studi literatur.	Wakaf mampu menjadi institusi yang berpotensi mengatasi permasalahan pembiayaan pada sektor pertanian di Nigeria. Selain itu juga mampu menjadi media untuk kerjasama antara Nigeria dengan Malaysia.
Ajeng Wahyu Puspitasari, (2017).	Optimizing Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity	Mengungkapkan potensi lahan wakaf di Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.	Metode paradigma kualitatif berdasarkan situasi nyata yang holistik, kompleks, dan detail.	Melalui konsep wakaf atau <i>muzara'ah</i> terdapat kesepakatan antara pemerintah dan petani dalam mengolah tanah pertanian. Dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani.
Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Mohammed Rizki Moi, and Riayati Ahmad, (2015).	The Potential of Waqf in Activating Idle Agricultural Land	Menganalisa kemungkinan kolaborasi wakaf dalam pengembangan lahan pertanian untuk mengatasi permasalahan finansial petani dalam mengembangkan lahan pertaniannya	Kualitatif Deskriptif	Wakaf dapat berperan dalam mengaktifkan kembali tanah pertanian tidak produktif di Malaysia dengan dua peran yaitu pertama memenuhi kebutuhan akan lahan kosong untuk pertanian dan kedua mengatasi masalah administrasi yang menghambat sektor pertanian.

Sumber : Berbagai sumber diolah, 2018.

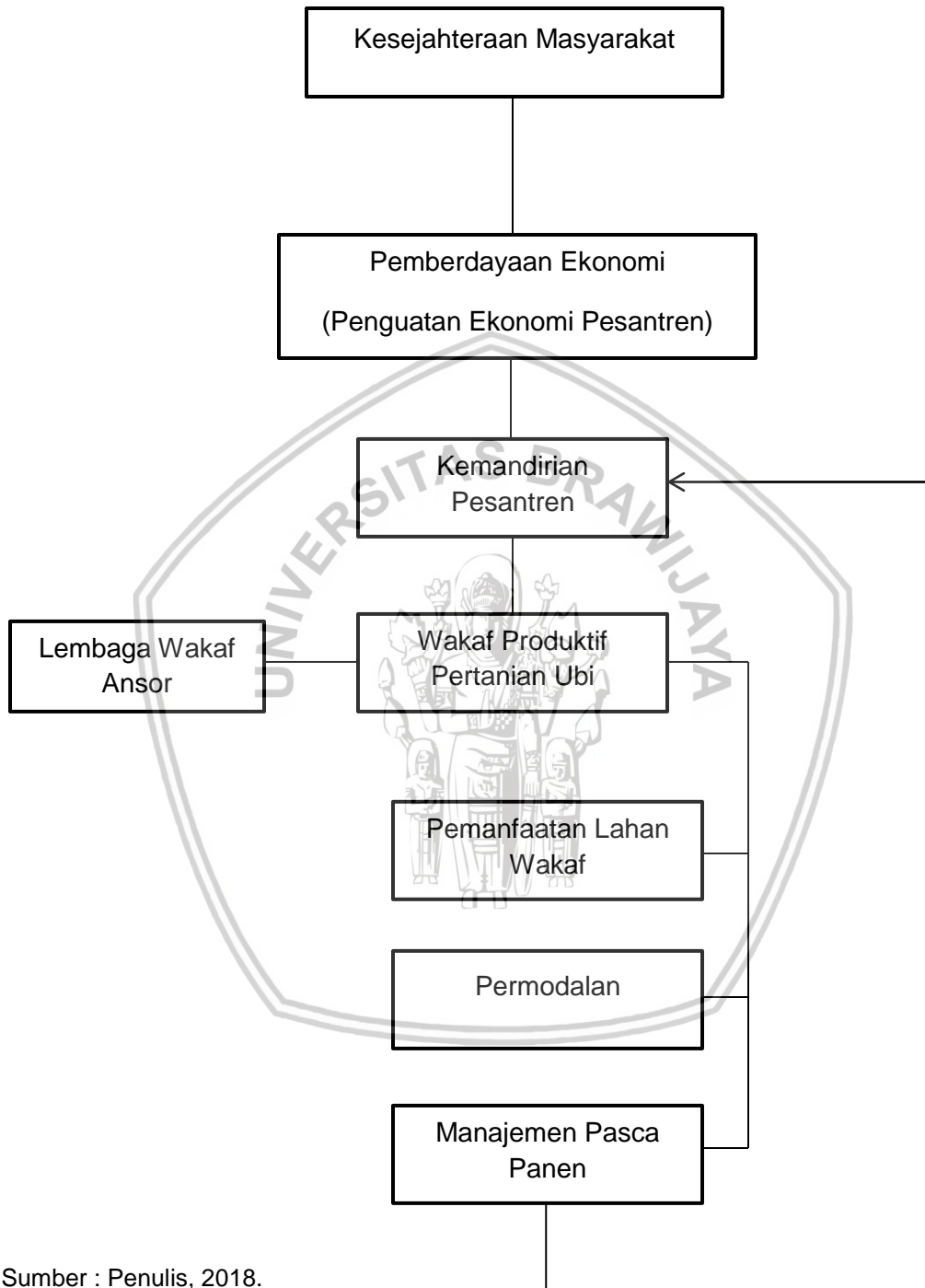
Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada kesamaan tema yang diambil yaitu wakaf produktif dan kontribusi wakaf pada masyarakat. Kesamaan lain yang juga terdapat dalam penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu juga fokus penelitian penelitian ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian terdahulu untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil dan mengetahui kontribusinya untuk masyarakat.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada studi kasus. Pada penelitian ini studi kasus difokuskan pada Lembaga Wakaf Ansor. Dimana pada penelitian terdahulu memilih studi kasus pada suatu daerah atau di pesantren. Selain itu pada fokus pada penelitian ini lebih spesifik untuk melihat pada peranan program wakaf pertanian ubi jepang yang terdapat pada Lembaga Wakaf Ansor. Dimana pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya masih umum pada pengelolaan tanah wakaf produktif.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penulis melakukan penelitian ini, maka supaya pembaca lebih memahami cara pikir penulis ada baiknya memahami bagan kerangka pikir penulis. Adapun kerangka pikir penulis adalah

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : Penulis, 2018.

Penelitian ini berawal dari upaya pemberdayaan ekonomi pada pesantren. Pesantren menjadi salah satu lembaga masyarakat yang memiliki peran di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Peran yang dimiliki pesantren tersebut menjadikannya sebagai salah satu lembaga yang berpotensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pendidikan. Salah satu bentuknya adalah program yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal. Adanya program ini diharapkan mampu memberi edukasi santri agar menjadi mandiri.

Upaya edukasi kemandirian santri dilakukan dalam upaya memberdayakan lahan wakaf pesantren. Dalam memberdayakan lahan wakafnya pesantren bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Ansor untuk mengelola lahan wakaf menjadi sektor produktif. Bentuk pengelolaan lahan wakaf di sektor produktif dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor melalui program penanaman ubi. Pengelolaan ubi dalam program ini menjadi sarana untuk pesantren dalam memberikan edukasi pertanian bagian santrinya.

Hasil dari pengelolaan lahan wakaf tersebut dapat diberdayakan melalui pesantren sebagai pengembangan sarana pendidikan dan pengembangan santri. Disisi lain dalam proses proses tanam, santri juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai pertanian ubi yang dapat mereka gunakan sebagai sarana mereka untuk menjadi mandiri setelah lulus dari pesantren nantinya. Kemandirian ekonomi yang dicapai melalui pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu mencapai indikator kesejahteraan baik dari sisi pesantren maupun santri yang akan menjadi bagian dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola pola kelola wakaf melalui wakaf produktif pertanian ubi pada Lembaga Wakaf Ansor, maka penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena lebih tepat dalam memperoleh penjelasan dari informan.

3.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer. Fokus pada penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan (Creswell,

2010). Pendekatan studi kasus dapat dikatakan sebagai sebuah eksplorasi dari suatu system terikat atau suatu kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Alasan menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini karena karakteristik penelitian ini yang sesuai dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang berupaya menelaah sebuah konteks kehidupan nyata yaitu pemanfaatan wakaf pada sektor produktif. Creswell (2010) mengemukakan bahwa dalam studi kasus melibatkan pengumpulan data yang banyak karena peneliti mencoba untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Diperlukan suatu analisis yang baik agar dapat menyusun suatu deskripsi yang terinci dari kasus yang muncul. Seperti misalnya analisis tema atau isu, yakni analisis suatu konteks kasus atau setting dimana kasus tersebut dapat menggambarkan dirinya sendiri.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Lembaga Wakaf Ansor yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 65A Kota Jakarta Pusat. Alasan pemilihan lokasi adalah karena pada kantor pusat LWA informasi mengenai wakaf pertanian ubi akan lebih mudah didapatkan dari informan. Waktu penelitian dalam pengambilan data kepada informan dimulai sejak tanggal 4 Maret 2018 hingga tanggal 31 Maret 2018.

3.4 Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis pada penelitian ini berfokus pada pola alokasi wakaf pada pertanian ubi dan kontribusinya dalam swasembada pangan. Berdasarkan unit analisis tersebut maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola wakaf di Lembaga Wakaf Ansor. Dipilihnya pengurus dan pengelola wakaf di Lembaga Wakaf Ansor sebagai informan karena informan tersebut adalah pihak yang mengetahui secara lengkap pengelolaan wakaf produktif pertanian ubi dari proses hulu hingga ke hilir. Adapun informan yang dipilih adalah :

- a. Informan kunci : Penanggung Jawab Program Wakaf Ubi
- b. Informan utama : Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi Wal Amal

3.5 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Menurut S. Nasution (1964), data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data primer untuk menjelaskan pola dan peran wakaf pertanian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dari lapangan atau lokasi LWA.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti surat-surat pribadi, buku harian, hingga dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder melalui metode dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan berbagai cara, antara lain :

1. Wawancara

Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2001). Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data tentang pola alokasi wakaf dalam pertanian ubi jepang di Lembaga Wakaf Ansor dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi pesantren.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2001). Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah atau data lain yang mendukung. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, koran, transkrip nilai yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai pola alokasi wakaf pada pertanian dan kontribusinya pada pemberdayaan ekonomi pesantren.

3. Observasi

Metode observasi secara ilmiah dapat diartikan sebagai pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2002). Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan alat indra terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah dengan mendeskripsikan data-data yang telah diolah secara kualitatif. Kemudian data-data tersebut dijabarkan guna memperjelas dalam penyampain hasil akhir.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan (Moleong, 2006). Reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam dari hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang (Suprayogo, 2001).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat (Riyanto, 2007).

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Peneliti harus mulai menyusun simpulan awal sejak dilakukannya pengambilan data. Pada tahap akhir kesimpulan tersebut harus diverifikasi kembali dengan catatan yang dimiliki peneliti dan dilanjutkan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang terkumpul dianalisis. Setelah hasil penarikan kesimpulan tersebut diverifikasi, yaitu peninjauan ulang pada catatan hasil lapangan.

3.8 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Agar dalam proses selanjutnya peneliti dapat mengetahui apa saja yang telah ditemukan dan di interpretasi di dalam lapangan, maka kita perlu mengetahui

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (sumber, metode, penelitian dan teori) dan pelacakan kesesuaian hasil. Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2006).

Menurut Moleong (2006) menyebutkan bahwa untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Terdapat tiga macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Menurut Moleong (2006) triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dapat ditempuh dengan membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi sumber juga dapat dilakukan melalui membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan melalui informan sumber atau sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2013) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini juga menggunakan triangulasi

teknik dengan penggunaan teknik yang berbeda yaitu wawancara dan observasi untuk memperkuat hasil lapangan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Wakaf Ansor

Perkembangan wakaf di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Peran *nazhir* dalam pengelolaan wakaf merupakan unsur penting agar wakaf dapat dikelola secara tepat sasaran. Lembaga Wakaf merupakan salah satu institusi yang ikut berperan dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia. Melalui lembaga wakaf, *waqif* dapat mewakafkan hartanya kepada *nazhir* profesional yang berada dibawah naungan lembaga wakaf. Lembaga wakaf di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2004 sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang wakaf. Salah satu lembaga *nazhir* wakaf yang mulai berkembang adalah Lembaga Wakaf Ansor (LWA) (Lembaga Wakaf Ansor, 2016).

LWA merupakan salah satu organisasi baru yang terbentuk dari adanya program bidang ekonomi di Gerakan Pemuda Ansor. LWA terbentuk sejak tahun 2016 dibawah GP Ansor. Terbentuknya LWA didasarkan atas inisiasi dan gagasan Bidang Perekonomian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sebagai wadah pengembangan organisasi dan menggagas ide baru dalam perspektif pengembangan dan peningkatan aset wakaf yang belum maksimal. LWA diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif.

Nahdhatul Ulama sebagai induk organisasi dari GP Ansor memiliki aset wakaf yang cukup besar. Aset wakaf yang cukup besar dimiliki oleh Nahdhatul Ulama tersebut belum mampu dikelola secara produktif. Oleh karena itu, GP Ansor merasa perlu untuk mengambil bagian melalui LWA dalam meningkatkan produktifitas aset wakaf baik aset wakaf internal NU maupun wakaf di Indonesia secara umum. LWA merupakan lembaga wakaf yang berfokus pada pengelolaan aset wakaf pada sektor produktif (Lembaga Wakaf Ansor, 2016).

LWA memiliki beberapa program wakaf yang bergerak pada pengelolaan wakaf produktif. Wakaf produktif yang dikelola oleh LWA bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Upaya pengelolaan wakaf secara produktif di LWA dilakukan sesuai dengan visi yang dimiliki LWA yaitu menjadi lembaga pengelola wakaf produktif terbaik di Indonesia sebagai pengawal eksistensi Islam *Ahlussunah Wal Jamaah*, *Rahmatan Lil'alam*, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). LWA memiliki 9 tugas pokok yang terdiri dari :

- 1) Menjalankan fungsi Peraturan Organisasi (PO) dibidang ekonomi GP Ansor.
- 2) Menjadi perpanjangan tangan GP Ansor dalam mengelola wakaf produktif.
- 3) Membantu pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang Wakaf.
- 4) Menjadi *partnership* Kementerian Agama dan lembaga lain dalam perihal wakaf.
- 5) Menjalin hubungan interorganisasi dengan lembaga terkait dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kualitas organisasi.

- 6) Melakukan pembinaan terhadap kader GP Ansor dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif.
- 7) Membuat pedoman pengelolaan, peraturan, dan pengembangan wakaf.
- 8) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala lokal, dan nasional hingga global serta harta benda wakaf terlantar.
- 9) Menjaga marwah dan nama baik organisasi dalam bertindak dan melakukan kebijakan ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LWA.

Program pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh LWA bergerak dalam 3 bidang utama yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Pengelolaan wakaf pada bidang perdagangan merupakan bentuk kontribusi LWA dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf produktif perdagangan yang dikelola oleh LWA adalah upaya solusi dalam mendorong masyarakat miskin dan dhuafa agar dapat meningkatkan kapasitas perekonomiannya. Program wakaf produktif perdagangan melibatkan 3 peran di dalamnya yaitu:

- 1) Pelaku Usaha (masyarakat ekonomi lemah)
- 2) pendampingan (LWA dan TIM Agronomi)
- 3) *Wakif*.

Bentuk pengengolaan dari program bidang perdagangan diantaranya Gerakan Wakaf Ruko untuk Pemberdayaan Umat, dan Gerakan Wakaf Barang Layak Jual (Lembaga Wakaf Ansor, 2016).

Program pengembangan wakaf melalui bidang pertanian adalah bentuk kontribusi Lembaga Wakaf Ansor dalam menjawab permasalahan akan kebutuhan komoditas pertanian. Tingginya permintaan atas komoditas pangan masih belum mampu dicapai dikarenakan adanya permasalahan keterbatasan lahan. Lembaga Wakaf Ansor melalui program wakaf lahan produktif pertanian berupaya memberikan solusi permasalahan kebutuhan lahan. Program wakaf pertanian yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor hingga saat ini telah memiliki mitra bersama Pondok Pesantren sebagai upaya pemberdayaan lahan wakaf lahan yang dimiliki pesantren. Komoditas pertanian yang saat ini menjadi fokus pengembangan Lembaga Wakaf Ansor adalah ubi. Lembaga Wakaf Ansor menargetkan adanya perluasan lahan wakaf yang dapat dikelola hingga 5 ha di tiap-tiap daerah yang cocok sebagai media tanam ubi.

Program wakaf ternak yang dikelola Lembaga Wakaf Ansor memiliki tema besar yaitu gerakan sejuta ternak untuk kemandirian umat. Wakaf ternak yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor bergerak melalui berbagai bidang peternakan yaitu peternakan sapi, ayam, kambing. Wakaf peternakan yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor memberikan bantuan pendampingan pada peternak dan bantuan modal melalui studi kelayakan. Lembaga Wakaf Ansor menargetkan untuk memiliki 1000 peternak binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2020.

Lembaga Wakaf Ansor selain melakukan pengelolaan wakaf produktif juga ikut berperan untuk memberdayakan lahan wakaf yang terlantar dan pengembangan sumberdaya manusia *nazhir* wakaf. Selain melakukan pengembangan sumberdaya

manusia, Lembaga Wakaf Ansor juga menjadi lembaga wakaf yang turut serta mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat. Salah satu upaya yang coba dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor dalam mengembangkan pengetahuan tentang wakaf adalah pelaksanaan program sekolah wakaf. Program sekolah wakaf dilaksanakan guna membangun sumberdaya *nazhir* wakaf yang profesional dan mampu menjadi penerus dalam mengelola wakaf secara tepat guna (Lembaga Wakaf Ansor, 2016).

4.2 Pola Kelola Wakaf Lahan melalui Pertanian Ubi

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, hal ini didukung adanya kesadaran masyarakat muslim untuk mengalokasikan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf. Perkembangan luas lahan wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan luas lahan wakaf menjadi peluang untuk dikembangkannya wakaf pada sektor pertanian. Upaya pengembangan wakaf pada sektor pertanian juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi ekonomi Indonesia yang cukup besar pada sektor agraris.

Tabel 4.1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Penggunaan Tanah Wakaf	Jumlah Lokasi	Persentase
Musholla	97.077	28,34%
Masjid	153.896	44,93%
Sekolah	36.247	10,58%
Makam	15.765	4,60%
Pesantren	10.882	3,18%
Sosial Lainnya	28.677	8,37%

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, 2017.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK) menunjukkan bahwa selama ini pengalokasian lahan wakaf masih berputar

pada pemanfaatan pembangunan masjid dan musholla. Sedangkan pada sektor lainnya masih belum menjadi perhatian utama dalam pengembangan wakaf. Salah satu yang perlu disoroti adalah pengelolaan pada bidang sosial yang bersifat produktif. Penggunaan lahan wakaf pada sektor produktif belum mampu mendominasi penggunaan pada masjid dan musholla. Dominasi yang terjadi pada penggunaan tanah wakaf tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf masih banyak dikelola pada sektor non produktif.

Pengembangan lahan wakaf ke arah sektor sosial produktif perlu dilakukan agar dapat memberikan kesejahteraan secara meluas. Program pengembangan lahan wakaf di bidang sosial sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disebutkan pada pasal 45 ayat 2 yaitu dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan pada Akta Ikrar Wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk pengelolaan dalam sektor produktif adalah melalui pertanian. Alasan utama selain besarnya pasar, pengembangan wakaf pada sektor pertanian mampu menjadi solusi dari permasalahan keterbatasan lahan pertanian. Wakaf produktif pertanian diharapkan mampu menjadi lahan pertanian abadi.

Lembaga Wakaf Ansor sebagai salah satu lembaga *nazhir* yang berfokus pada pengelolaan wakaf bidang produktif berupaya menjawab permasalahan sektor pertanian melalui program wakaf pertanian ubi. Wakaf pertanian ubi yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor merupakan bentuk peran dalam mengembangkan lahan wakaf yang belum dikelola. Pada program wakaf produktif pertanian ini, Lembaga Wakaf Ansor melakukan kerjasama dengan Pondok

Pesantren. Lahan wakaf yang menjadi obyek pengelolaan Lembaga Wakaf Ansor merupakan lahan wakaf yang dimiliki pondok pesantren.

Program wakaf pertanian ubi yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor berada dibawah naungan bidang ekonomi Gerakan Pemuda Ansor, dilatar belakanginya oleh potensi pasar yang cukup besar pada komoditas pertanian. Alasan lain yang juga mendorong adanya wakaf pertanian adalah ketersediaan sumberdaya yang memadai dan sesuai dengan iklim untuk sektor pertanian. Permintaan komoditas pertanian sebagai bahan pangan yang semakin tinggi dan terbatasnya ruang lahan pertanian menjadi salah satu peluang besar yang dijadikan dasar Lembaga Wakaf Ansor dalam arah pengembangan wakaf di sektor pertanian. Alasan pemilihan sektor pertanian pada pengelolaan wakaf sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fachrul selaku penanggungjawab wakaf produktif pertanian.

“Kami mulai mencari benang merah antara kemampuan sumber daya yang ada dengan *market* yang tersedia, lalu bagaimana dengan pertanian? Dasar pemikiran kami ke pertanian, memang basic dari Indonesia yang kuat ini harusnya adalah pertanian karena tanah yang subur dan iklim yang mendukung. Serta dengan populasi yang tinggi kami meyakini bahwa pangan tidak akan pernah mati.”

Pemilihan ubi sebagai komoditas tanam pada lahan wakaf berdasarkan dari berbagai pertimbangan yang dilakukan LWA. Salah satu yang menjadi latar belakang dipilihnya ubi adalah permintaan pasar terhadap komoditas ubi yang cukup besar. Ubi memiliki keunggulan yang bisa diolah menjadi berbagai macam jenis bahan pangan. Keunggulan lain yang menjadi pertimbangan LWA dalam memilih ubi adalah potensi besar ubi sebagai komoditas yang memiliki pangsa pasar baik secara lokal maupun ekspor. Pertimbangan yang menjadi alasan dipilihnya ubi oleh

LWA sebagai komoditas tanam pada wakaf disampaikan pula oleh Bapak Fachrul sebagai berikut :

Lokasi dari lahan wakaf yang dijadikan sebagai wakaf produktif terletak pada Provinsi Jawa Barat tepatnya pada Kabupaten Cianjur. Selain alasan adanya kerjasama dengan Pondok Pesantren, pemilihan Provinsi Jawa Barat adalah iklim yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembudidayaan ubi. Alasan lain juga dikarenakan pada provinsi Jawa Barat, pengelolaan wakaf produktif pada sektor sosial produktif masih kecil yaitu sebanyak 8.058 lokasi pada tahun 2016. Jumlah ini masih kecil dibandingkan dengan pengelolaan wakaf sebagai masjid pada tahun 2016 sebanyak 34.962 lokasi. Berikut adalah rincian penggunaan lahan wakaf di Jawa Barat menurut Sistem Informasi Wakaf (2016).

Tabel 4.2 Data Penggunaan Lahan Wakaf di Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2016

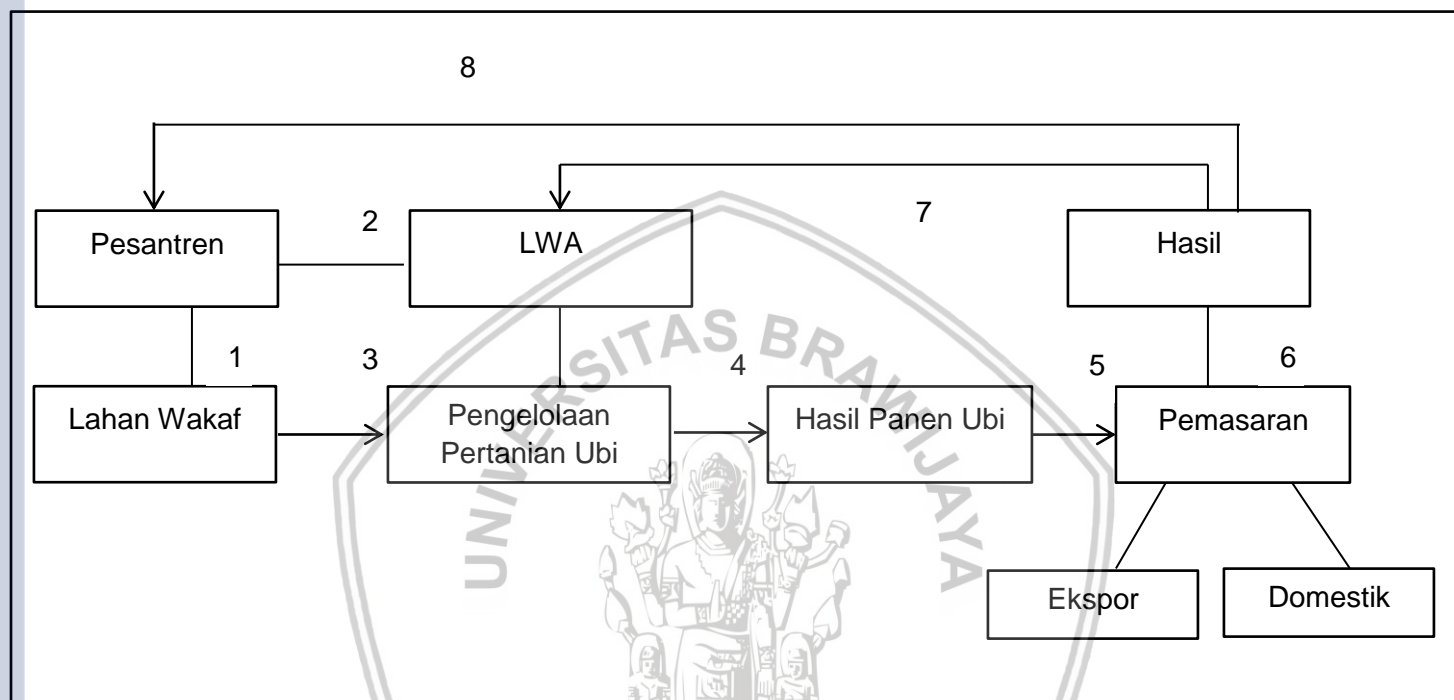
No	Penggunaan Lahan Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Musholla	10.063
2	Masjid	34.962
3	Makam	1.843
4	Sekolah	7.428
5	Pesantren	3.007
6	Sosial Lainnya	8.058

Sumber : Sistem Informasi Wakaf, 2016.

Program pengelolaan wakaf produktif pertanian melibatkan pihak eksternal yang memiliki peranan dalam berlangsungnya pengelolaan wakaf yaitu Pihak pondok Pesantren dan Pihak Bidang Ekonomi Gerakan Pemuda Ansor yang membawahi terbentuknya Lembaga Wakaf Ansor. Pihak pesantren memiliki peranan penting dalam ketersediaan adanya lahan wakaf yang digunakan untuk mengembangkan pertanian. Sedangkan pihak Gerakan Pemuda Ansor melalui Lembaga Wakaf Ansor berperan penting dalam pengelolaan serta manajemen

pengelolaan pertanian ubi. Berikut adalah pola pengelolaan wakaf secara garis besar yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor.

Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf melalui Pertanian Ubi Secara Garis Besar



Sumber : Data Lapangan, 2018.

Berdasarkan pada gambar 4.1, pola pengelolaan wakaf pertanian ubi dapat dibagi menjadi 3 pola kecil. Pola pertama adalah pola kerjasama antara pesantren dan Lembaga Wakaf Ansor dalam pemanfaatan tanah wakaf. Pola pertama yang terdapat pada poin 1 hingga poin 6 menjelaskan mengenai bentuk kerjasama yang dijalin antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren. Selain itu, pola pertama juga menjelaskan hubungan timbal balik yang terjadi antara kedua pihak dengan adanya wakaf pertanian ubi.

Pola kedua yang terdapat pada poin 4 hingga poin 6 adalah pola pengelolaan masa tanam ubi yang berada dibawah tanggungjawab Lembaga Wakaf Ansor. Pola

kedua menjelaskan mengenai teknis pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan Lembaga Wakaf Ansor. Pada pola kedua juga menjelaskan peran yang dilakukan Lembaga Wakaf Ansor selama proses masa tanam. Pola ketiga adalah pola pemasaran yang merupakan salah satu bentuk manajemen pasca panen. Pola ketiga akan menggambarkan alur pemasaran yang dilakukan LWA dalam mendistribusikan hasil panen ubi.

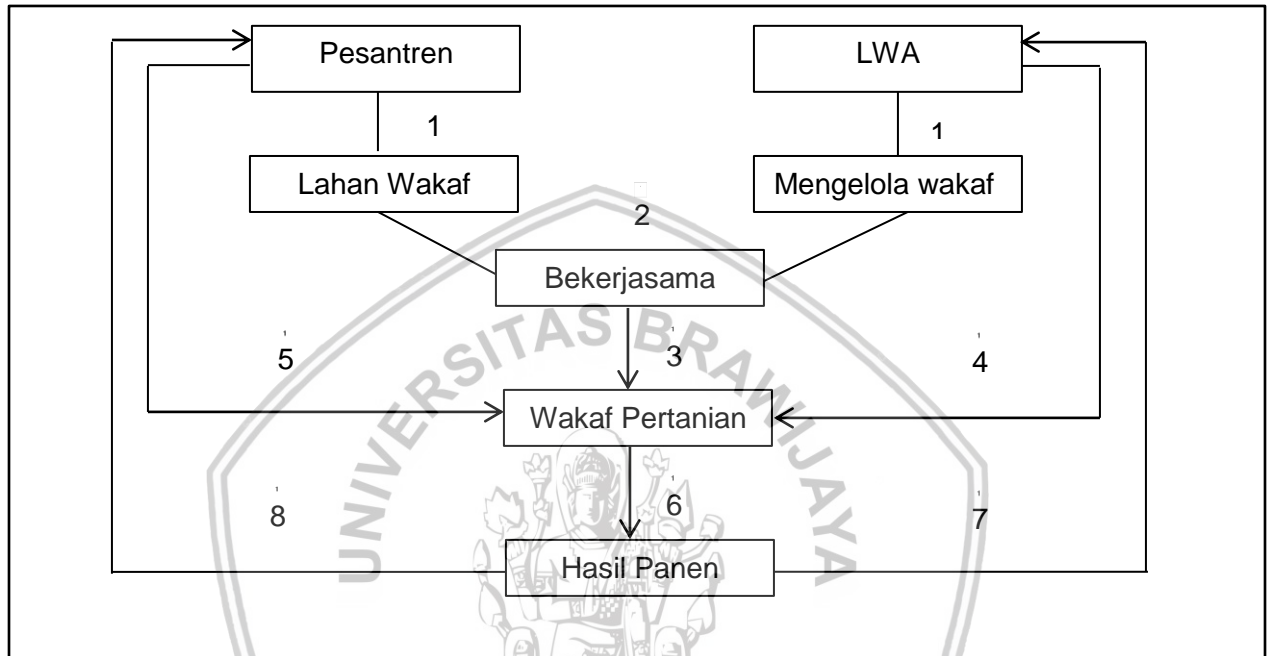
4.2.1 Pola Pertama : Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pesantren

Program wakaf pertanian ubi yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Ansor berawal mula dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor melalui Departemen Bidang Ekonomi dengan Pesantren. Kerjasama pemanfaatan wakaf dilakukan dalam rangka pemberdayaan lahan wakaf yang dimiliki pondok pesantren agar dapat dikelola secara produktif dan memiliki nilai ekonomi. Selain memiliki nilai ekonomi, pemanfaatan lahan wakaf secara produktif diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren.

Wakaf pertanian ubi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh GP Ansor dan Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal. Kerjasama antara pesantren menjadi peluang baru bagi GP Ansor dan LWA untuk memberdayakan pondok pesantren dalam bidang agronomi. Latar belakang lain yang mendorong LWA dan GP Ansor untuk bermitra dengan pesantren adalah melihat masih luasnya lahan wakaf milik pesantren yang belum dikelola secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Pak Fachrul seperti berikut :

“Karena untuk wakaf ini yang dimanfaatkan adalah tanahnya untuk dijadikan wakaf produktif namun saat ini masih penajakan”

Gambar 4.1 Pola Pertama : Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren



Sumber: Data Lapangan, 2018.

Pengelolaan wakaf diinisiasi dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Wakaf Ansor dengan pihak Pondok Pesantren Darul Ilmi wal ‘Amal. Kerjasama yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal ‘Amal dengan Lembaga Wakaf Ansor di dorong alasan adanya ketersediaan lahan wakaf milik pondok pesantren yang tidak digunakan dan tidak dikelola karena kontur tanah yang cukup curam. Disisi lain Lembaga Wakaf Ansor sebagai *nazhir* wakaf tertarik untuk mengelola lahan wakaf yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Ilmi wal ‘Amal. Pola kerjasama kedua pihak tergambarkan melalui gambar 4.2.

Berdasarkan gambar 4.2 pada poin 1 adalah latar belakang munculnya wakaf pertanian dimana pondok pesantren memiliki lahan wakaf yang cukup luas. Namun

lahan wakaf yang dimiliki pesantren belum dapat dikelola secara optimal. Terdapat lahan wakaf seluas 3 Hektar yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal yang belum dikelola. Pada poin 1 di sisi lain Lembaga Wakaf Ansor sebagai lembaga wakaf memerlukan lahan wakaf untuk dikembangkan ke arah produktif sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh LWA. Salah satu tugas pokok tersebut yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala lokal, dan nasional hingga global serta harta benda wakaf terlantar.

Poin 2 adalah bentuk kesepakatan bekerjasama antara pihak pondok pesantren dan Lembaga Wakaf Ansor. Lembaga Wakaf Ansor dan Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal sepakat untuk mengembangkan lahan wakaf secara produktif. Kesepakatan yang dilakukan pihak Lembaga Wakaf Ansor yaitu sepakat untuk mengelola lahan wakaf, dimana sebagian hasilnya dapat digunakan oleh Pondok Pesantren sebagai pengembangan ekonomi pondok pesantren. Sedangkan kesepakatan pada pihak pondok pesantren adalah kesepakatan untuk menyerahkan lahan wakafnya kepada Lembaga Wakaf Ansor untuk dikelola sebagai wakaf produktif.

Kerjasama yang terjadi antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren sejalan dengan karakteristik hak kepemilikan yang disampaikan oleh Tietenberg (1992) yaitu karakteristik transferabilitas. Karakteristik transferabilitas menyatakan bahwa adanya hak kepemilikan mampu dipindahkan dari satu pemilik ke pihak lain lewat pertukaran secara sukarela. Pada kerjasama yang dilakukan pada poin 2 menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal sebagai pihak pertama yang bertanggungjawab atas lahan wakaf yang diwakafkan oleh *waqif* kepada pihak pesantren. Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak

menjadi bentuk gambaran adanya perpindahan hak penggunaan manfaat lahan dari pondok pesantren kepada Lembaga Wakaf Ansor. Peralihan penggunaan manfaat yang terjadi merupakan bentuk transferabilitas hak milik yang lahan wakaf pondok pesantren.

Poin ke 3 merupakan bentuk pengelolaan dari adanya kesepakatan antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren yaitu berbentuk pengelolaan lahan wakaf melalui pertanian ubi. Selanjutnya pada poin 4 adalah bentuk kontribusi yang diberikan oleh LWA dalam pengelolaan wakaf adalah tenaga profesional dan teknis penanaman ubi. Poin ke 5 adalah bentuk keikutsertaan Pondok Pesantren yaitu mempercayakan lahan wakafnya sebagai lahan untuk pengelolaan wakaf produktif pertanian.

Poin ke 6 merupakan hasil dari adanya penanaman ubi yaitu berupa panen ubi dan manajemen pasca panen yaitu pemasaran. Pemasaran dari hasil panen dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor selaku penanggungjawab wakaf produktif pertanian ubi. Hasil dari pemasaran yang diperoleh adalah berupa finansial yang sebagian didistribusikan kepada pesantren dan sisanya masuk pada LWA sebagai pembiayaan modal pengembangan selanjutnya.

Selanjutnya pada poin ke 7 adalah hasil yang diterima Lembaga Wakaf Ansor dari pasca panen adalah pemasukan finansial yang digunakan untuk biaya modal dan perluasan. Sedangkan poin ke 8 adalah hasil yang diterima oleh pesantren berupa pengembangan sumberdaya santri melalui edukasi selama masa tanam dan pengembangan pesantren melalui finansial yang diperoleh dari hasil panen.

Gambar 4.3 Gambaran Lahan Wakaf yang Dikelola Menjadi Wakaf Pertanian



Sumber: Data Lapangan, 2018.

Gambar 4.3 merupakan tanah yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor sebagai wakaf pertanian ubi. Lahan wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor merupakan lahan yang dimiliki pesantren namun belum dikelola secara maksimal. Penyebab belum dapat dikelolanya lahan oleh pesantren adalah karena lokasi lahan yang terletak pada keadaan curam. Peluang adanya lahan yang belum dikelola mendorong LWA untuk mengelolanya secara prokutif melalui pertanian.

Selain memanfaatkan lahan wakaf yang ada di Pondok Pesantren, program ini juga merupakan bentuk keseriusan dari Lembaga Wakaf Ansor dalam memberdayakan santri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor bertujuan sebagai salah satu integrasi wakaf dalam memberikan kebermanfaatan umat. Pondok Pesantren Darul Ilimi wal Amal sendiri merupakan pondok pesantren

yang dibangun untuk mendidik santri dengan latar belakang anak yatim dan kurang mampu. Pelatihan dan integrasi melalui program ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi santri mengenai bercocok tanam secara profesional dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Tujuan pelatihan santri dijelaskan oleh Pak Fachrul sebagai berikut :

“Awalnya program itu mendidik santri, jadi wakaf ansor ini menintegrasikan santri yang belajar di umum masuk ke pendidikan non-formal bersama teman-teman agronomi IPB untuk melatih mereka bercocok tanam. Program awal selama 3 bulan, namun saat ini berhenti sementara untuk penguatan market”

Modal yang dikeluarkan oleh Lembaga Wakaf Ansor dalam wakaf pertanian ubi adalah sebesar Rp 48.000.000/hektar. Tahap awal, modal yang di investasikan adalah berasal dari investasi internal lembaga Gerakan Pemuda Ansor. Alasan belum teralokasikannya dana wakaf tunai ke dalam modal pengelolaan ubi adalah untuk penguatan pasar. Menurut Pak Fachrul, wakaf tunai baru akan disalurkan ke dalam pembiayaan pertanian jika pangsa pasar yang mereka miliki telah kuat untuk menopang pengeluaran yang akan mungkin terjadi.

“Wakaf tunai masih belum disalurkan karena kita nggak mau nanti orang melihatnya beresiko. Kita dari Ansor mau menanggung ongkos belajar dan penjajakannya dulu. Setelah market terbentuk nanti wakaf tunai akan disalurkan. Jadi yang dialokasikan hanya tanah wakafnya saja.”

Saat memasuki masa panen Lembaga Wakaf Ansor sebagai penanggungjawab memperoleh hasil dari penjualan panen. Hasil perolehan dari penjualan panen ubi terbagi ke dalam tiga pos penting diantaranya untuk (1) pembiayaan pengembangan program wakaf pertanian ubi di masa tanam

selanjutnya, (2) untuk mengembangkan pendidikan pesantren agar dapat memberikan lebih banyak lagi fasilitas dan menambah jumlah santri yatim dan kurang mampu, serta (3) dialokasikan sebagai pengembangan sosial lainnya.

Hasil yang juga dirasakan oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal adalah adanya pengembangan ekonomi melalui wakaf yaitu secara finansial adanya wakaf akan mampu membantu Pondok Pesantren untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan melalui hasil wakaf pertanian. Sedangkan bagi Lembaga Wakaf Ansor adanya wakaf pertanian membantu Lembaga Wakaf Ansor untuk mampu mengelola lahan wakaf menjadi bidang ekonomi yang produktif. Hasil yang diperoleh dari penjualan panen dapat digunakan oleh Lembaga Wakaf Ansor sebagai modal dalam mengembangkan wakaf pertanian dan menutupi kebutuhan operasional wakaf pertanian ubi.

Gambar 4.4 Contoh Tanaman Ubi yang Siap Panen dari Wakaf Pertanian Ubi



Sumber : Lembaga Wakaf Ansor, 2018.

Gambar 4.4 merupakan gambaran saat ubi yang ditanam melalui program wakaf pertanian ubi mulai memasuki masa siap panen. Ubi yang siap panen nantinya akan dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor melalui pemasaran. Hasil dari penrolehan pemasaran ubi akan di alokasikan kepada pondok pesantren. Bantuan dana yang diperoleh oleh pesantren dari Lembaga Wakaf Ansor akan digunakan sebagai pengembangan pendidikan di pesantren dan melatih kemandirian santri yang belajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal.

Interaksi yang terjadi dalam pola pertama menggambarkan bahwa terjadi suatu bentuk interaksi kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak kerjasama dalam pola pertama memberikan gambaran kontrak principal yang memungkinkan terjadinya pendelegasian sebuah aktivitas dari principal yaitu pesantren kepada agen yaitu Lembaga Wakaf Ansor. Pendelegasian aktivitas yang terjadi dalam pola pertama tidak terlihat potensi terjadinya hambatan yang memicu terjadinya asimetri informasi dari pihak agen kepada principal. Bentuk interaksi kontrak antara kedua pihak telah memenuhi kesepakatan seperti penjelasan yang terjadi dalam teori principal.

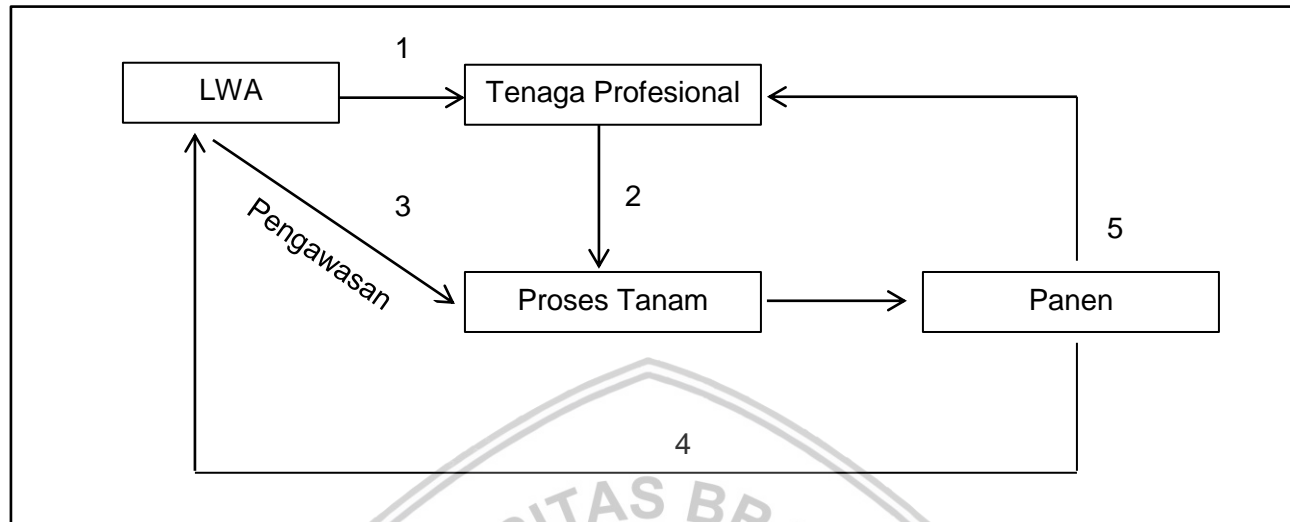
Sedangkan pada sisi wakaf lahan, sesuai dengan yang diungkapkan dalam Undang-Undang tentang Wakaf setidaknya terdapat beberapa unsur wakaf lahan yang harus dipenuhi. Salah satu unsurnya yaitu penggunaan tanah wakaf harus jelas peruntukannya baik digunakan untuk peribadatan maupun bentuk sosial lainnya. Pemanfaatan tanah wakaf yang terjadi pada program wakaf pertanian ubi yang tergambarkan melalui interaksi pola pertama menunjukkan bahwa peruntukan lahan wakaf pada awal mulanya dari wakif kepada *nazhir* adalah untuk pembangunan pesantren. Adanya pengelolaan pertanian ubi pada bidang tanah

wakaf pesantren harus sejalan dengan peruntukan awalnya yaitu mendukung pembangunan atau kebermanfaatan dari sisi pesantren.

Pihak Lembaga Wakaf Ansor selain berperan sebagai agen disini memiliki tanggungjawab secara formal sesuai teori kontrak yaitu melaksanakan aktivitas yang didelegasikan principal kepada agen. Aktivitas yang dilaksanakan oleh agen didalam pola ini haruslah mengacu pada unsur yang wajib dipenuhi dalam aktivitas pengelolaan wakaf lahan yaitu kejelasan peruntukan dalam pengelolaannya. Interaksi yang terjadi dalam pola pertama menunjukkan bahwa aliran manfaat yang dihasilkan adanya pengelolaan wakaf lahan pada pertanian ubi juga terdistribusikan pada peruntukkan kemaslahatan pesantren yaitu melalui edukasi kemandirian yang melibatkan santri dalam proses pertanian dan aliran pembagian hasil panen ke dalam pengembangan pendidikan di dalam pesantren.

4.2.2 Pola Kedua : Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi

Program pengelolaan wakaf melalui budidaya ubi juga dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor dalam upaya memenuhi permintaan pasar akan komoditas ubi yang berkualitas tinggi. Ubi dengan kualitas tinggi memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk menjadi komoditas ekspor. Dalam upaya menghasilkan ubi yang berkualitas tinggi, pengelolaan teknis penanaman dan budidaya ubi dilakukan oleh pihak internal kader Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan tenaga profesional Institut Pertanian Bogor.

Gambar 4.5 Pola Kedua : Pengelolaan Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi

Sumber : Data Lapangan, 2018.

Menurut hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pola kedua, Lembaga Wakaf Ansor dibantu oleh tenaga profesional yang merupakan kader internal dari Gerakan Pemuda Ansor. Alasan pemilihan dengan kader internal adalah agar bisa menekan biaya operasional pada masa awal tanam. Efisiensi biaya operasional yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor dikarenakan pada tahun pertama yaitu tahun 2017-2018 program wakaf pertanian ubi masih pada proses penjajakan dan penyesuaian pada pasar.

Berdasarkan pada gambar 4.5 terdapat 6 poin penting yang menjelaskan pola pengelolaan teknis selama masa tanam ubi. Poin 1 dapat dijelaskan bahwa Lembaga Wakaf Ansor sebagai penanggungjawab wakaf ubi memperoleh bantuan tenaga profesional yang berasal dari internal GP Ansor. Tenaga profesional dalam proses tanam berperan penuh dalam teknis penanaman ubi dimulai dari proses pembenihan hingga ubi siap untuk dipanen. Dalam upaya memperoleh hasil panen

yang maksimal, teknis penanaman ubi juga menggunakan teknologi mesin agar mendukung hasil panen yang berkualitas.

Pada poin ke 2 selanjutnya tenaga profesional melakukan penggarapan lahan pertanian. Proses penggarapan lahan dimulai dari penyiapan lahan hingga proses panen. Dalam proses penggarapan ini tenaga profesional juga menggunakan alat modern agar dapat mempermudah penanaman ubi. Selama masa proses penanaman dapat menjadi media edukasi bagi santri. Proses penggarapan yang dilakukan oleh tenaga profesional diharapkan mampu menghasilkan ubi dengan kualitas tinggi sesuai dengan target pasar yang direncanakan LWA.

Poin ke 3 merupakan bentuk peran dari Lembaga Wakaf Ansor sebagai penanggungjawab wakaf pertanian ubi. Pada poin ke 3 Lembaga Wakaf Ansor berperan sebagai pengawas selama masa penanaman secara teknis oleh tenaga profesional. Lembaga Wakaf Ansor berperan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan agar hasil panen nantinya sesuai dengan target yang diharapkan. Pengawasan dilakukan dengan memastikan proses masa tanam ubi berjalan sesuai dengan target panen yang telah direncanakan.

Poin ke 4 menunjukkan keadaan saat memasuki masa panen ubi. Pada saat panen ubi baik Lembaga Wakaf Ansor maupun penggarap memiliki peran yang penting. Sedangkan Lembaga Wakaf Ansor berperan penting dalam penentuan pasar untuk distribusi penjualan hasil panen. Setelah memasuki masa panen, Lembaga Wakaf Ansor memperoleh manfaat yaitu adanya pemasukan secara finansial yang digunakan untuk menutupi biaya masa tanam selanjutnya.

Sedangkan pada poin ke 5 tenaga profesional berperan penting dalam mengelola manajemen pasca panen sebelum akhirnya masuk pada penjualan. Selain melakukan manajemen pasca panen, tenaga penggarap juga memperoleh manfaat dari hasil penjualan ubi. Manfaat yang diperoleh yaitu berupa upah yang diberikan oleh LWA yang berasal dari hasil pemasaran panen ubi.

Gambar 4.6 Gambaran Pengelolaan Pada Lahan Pertanian Ubi



Sumber : Data Lapangan, 2018.

Gambar 4.6 merupakan gambaran pada saat ubi memasuki masa tanam. Selama masa tanam, tenaga penggarap berperan penting dalam memantau perkembangan ubi sampai pada saatnya memasuki panen.

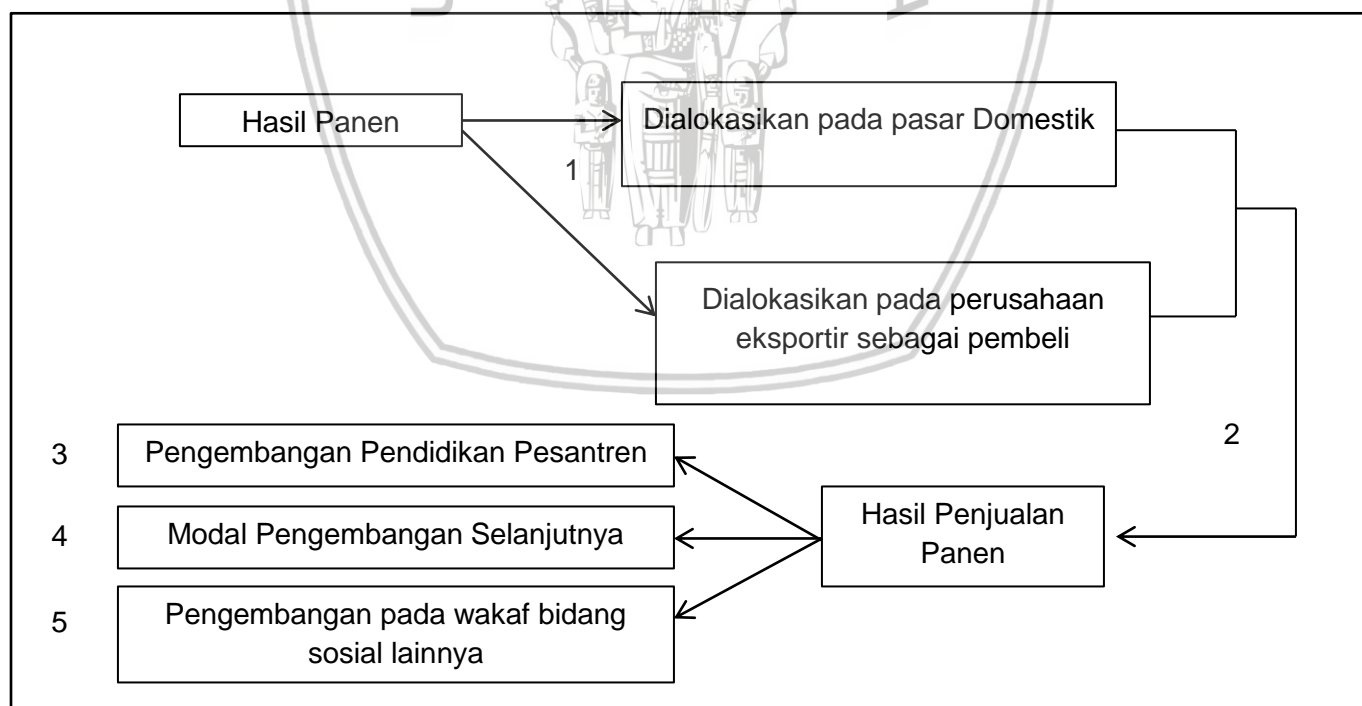
Pola kedua menjelaskan bahwa manajemen pengelolaan pada masa periode tanam ubi Lembaga Wakaf Ansor memiliki peran sebagai penanggungjawab utama dalam mengelola lahan wakaf. Pengelolaan wakaf secara produktif menurut Al Zuhaili harus dilakukan dengan memperhatikan relevansi kehidupan masyarakat

dan tidak boleh menghilangkan karakter kekekalan wakaf. Proses kelola wakaf lahan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor menggambarkan bahwa wakaf lahan yang berasal dari Pondok Pesantren tetap diupayakan untuk terjaga karakter kekekalannya walaupun terjadi kendala dalam proses masa tanam dan pasca tanam.

4.2.3 Pola Ketiga : Pengelolaan Pasca Panen Wakaf Pertanian Ubi

Proses pengelolaan wakaf pertanian ubi tidak hanya berhenti pada proses panen saja. Namun perlu adanya manajemen pasca panen agar hasil panen dapat memperoleh hasil penjualan sesuai dengan target. Berikut adalah pola berdasarkan pengamatan lapangan mengenai manajemen pasca panen wakaf pertanian ubi :

Gambar 4.7 Pola Ketiga : Pengelolaan Pasca Panen



Sumber: Data Lapang, 2018.

Berdasarkan pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 5 poin yang menjelaskan alur pengelolaan wakaf ubi pasca panen. Poin 1 merupakan tahap pendistribusian hasil panen ke pangsa pasar lokal dan ekspor. Pendistribusian pada kedua pasar merupakan dibawah tanggungjawab bidang perekonomian GP Ansor. Dalam mendistribusikan hasil panen pada pangsa lokal adalah langsung melalui sistem kontrak jual-beli dengan perusahaan lokal yang mendistribusikan ke pasar domestik. Sedangkan pada pangsa pasar ekspor, dilakukan langsung dengan mendistribusikan kepada perusahaan pengeksport yang berperan sebagai pembeli hasil panen ubi.

Poin 2 merupakan keadaan dimana setelah hasil panen terdistribusi ke pasar, lalu LWA memperoleh hasil secara finansial. Pendapatan tersebut merupakan hasil dari penjualan hasil panen ubi. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan ubi pada tahap selanjutnya dialokasikan pada 3 bagian penting. Poin 3 adalah bentuk pengalokasian hasil penjualan yaitu pada tujuan utama untuk pengembangan pondok pesantren. Poin ke 4 adalah pengalokasian untuk dijadikan sebagai modal dan tambahan cadangan modal yang akan digunakan saat akan melakukan perluasan budidaya ubi. Poin ke 5 adalah bentuk pengalokasian sebagai modal pada bentuk pengembangan wakaf di bidang sosial lainnya.

Dari keterangan Bapak Fachrul menyatakan bahwa hasil panen pada tiap hektar mencapai 22 Ton. Sedangkan luas lahan pertanian yang dimiliki Lembaga Wakaf Ansor dalam wakaf pertanian ubi adalah seluas 3 hektar. Harga jual pada pasca panen yang diperoleh adalah sebesar Rp 5.000,00/Kilogram. Dengan begitu hasil perolehan panen yang dapat diperoleh oleh Lembaga Wakaf Ansor adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Total Hasil Panen : 22 Ton/hektar x 3 hektar : 66 Ton
2. Jumlah perolehan harga jual : Rp 5.000/Kilogram x 66000 kilogram
= Rp 330.000.000,00.

Hasil perolehan akhir dari penjualan hasil panen adalah sebesar Rp 330.000.000, 00. Pada pola pasca panen ubi yang telah diproses dan siap jual langsung di distribusikan kepada pasar lokal oleh Lembaga Wakaf Ansor. Sedangkan sisanya didistribusikan kepada perusahaan yang telah melakukan pembelian kontrak saat mendekati musim panen. Namun perlu diketahui bahwa pada 3 kali masa tanam awal, program wakaf pertanian ubi mengalami kerugian.

Kerugian awal dialami saat masa penanaman komoditas jenis ubi jepang, kerugian terjadi disebabkan manajemen pengelolaan budidaya yang masih belum rapi. Kerugian tersebut membuat pihak Gerakan Pemuda Ansor kembali berbenah untuk memberanikan diri mulai masuk juga ke pasar lokal. Menurut Penuturan Pak Fachrul adanya kegagalan yang sempat dialami oleh Gerakan Pemuda Ansor membuat pelajaran baru bahwa komoditas ubi juga memiliki pangsa pasar yang besar di tingkat lokal.

Selama masa pembenahan atas kerugian yang diperoleh periode sebelumnya, sempat terjadi rotasi tanam yang pada awalnya jenis umbi beralih pada singkong. Namun rotasi ke komoditas singkong tidak bertahan lama, dikarenakan pasar lebih merespon pada komoditas ubi dibandingkan singkong. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya kembali kepada komoditas ubi yaitu ubi cilembu. Alasan peralihan pada jenis ubi cilembu adalah menjawab besarnya permintaan pasar pada komoditas ubi cilembu secara lokal maupun ekspor.

Pengelolaan wakaf produktif melalui pertanian ubi merupakan salah satu implementasi dari pendapat Imam Maliki tentang wakaf produktif. Manajemen wakaf produktif menurut Imam Maliki perlu dilakukan dengan mengelola dan mengambil manfaat aset wakaf agar relevan dengan zaman. Pengelolaan wakaf produktif sendiri sebenarnya juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu aspek *good deed*. Aspek *good deed* menjelaskan bahwa manajemen wakaf harus mengarah kepada kebermanfaatan yang lebih besar. Tidak hanya memberdayakan tapi juga mempertimbangkan dampaknya.

Upaya yang dilakukan melalui wakaf produktif pertanian ubi pada substansinya tidak hanya sekedar memberdayakan lahan wakaf menjadi produktif. Wakaf pertanian ubi jika ditelaah seharusnya menjadi bentuk pengelolaan wakaf yang mengarah pada kebermanfaatan yang lebih besar. Selain kebermanfaatan yang lebih besar, hadirnya pengelolaan wakaf pertanian ubi juga harus sesuai dengan aspek *good deed* yang mempertimbangkan dampaknya sebagai bentuk pemecahan masalah yang menjadi tujuan pengelolaan wakaf.

Kegagalan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif jika ditelaah berdasarkan pada aspek *free rider* seharusnya wakaf produktif diupayakan untuk terhindar dari berkurangnya nilai aset wakaf dalam pengelolaannya. Terjadinya kerugian dalam pengelolaan dalam wakaf disini masih dalam bentuk kerugian yang belum mengurangi nilai aset wakaf itu sendiri. Jika kerugian yang dialami dalam penanaman ubi menyebabkan berkuangnya nilai aset wakaf maka harus dilakukan pemulihan kembali agar nilai aset wakaf yang berkurang tetap dapat dipertahankan. Gambar 4.8 adalah salah satu contoh hasil panen dari ubi cilembu yang merupakan hasil dari wakaf pertanian ubi.

Gambar 4.8 Hasil Panen Ubi



Sumber : Dokumentasi GP Ansor, 2017

4.3 Pengelolaan Wakaf melalui Pertanian Ubi dalam Pemeberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Program pengelolaan lahan wakaf yang dilakukan oleh GP Ansor memberikan dampak bagi Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang menjadi mitra dalam program ini adalah Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal yang terletak di Desa Cigancana, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan pesantren yang berdiri diatas tanah wakaf seluas 50 hektar. Santri yang diasuh oleh Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan santri dengan latar belakang anak yatim yang memiliki permasalahan kemampuan ekonomi.

Pondok Pesantren ini merupakan salah satu bentuk pondok pesantren agronomi. Besarnya potensi pertanian yang dimiliki oleh Pondok Pesantren mendorong adanya pengembangan pada sektor pertanian. Sektor pertanian

dianggap sebagai bidang yang mampu menopang perekonomian pesantren dikarenakan kondisi geografis dari pesantren tersebut yang sesuai dengan sektor pertanian. Faktor lain yang juga ikut mendukung pengembangan ke sektor pertanian adalah pangsa pasar dan kebutuhan akan bahan makanan yang besar mendorong potensi besar nilai ekonomi komoditas pertanian.

Selama masa program wakaf produktif pertanian baik dari sisi pesantren maupun santri mendapatkan manfaat. Manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak merupakan bentuk upaya wakaf dalam memberikan kebermanfaat bagi umat. Bentuk manfaat yang dirasakan baik dari sisi edukasi sumber daya manusia dan finansial telah menjadikan pendorong adanya pemberdayaan ekonomi yang coba dilakukan melalui pemanfaatan lahan wakaf.

4.3.1 Peran Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Ilmi wal Amal

Menurut Suharto (2005) pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Berdasarkan teori pemberdayaan ekonomi, wakaf mencoba untuk memandirikan pondok pesantren. Salah satu pihak yang merasakan manfaat dari adanya pengelolaan wakaf produktif ubi adalah santri. Keterlibatan santri di dalam masa penanaman ubi dibawah pendampingan pihak tim agronomi yang dimiliki oleh GP Ansor. Dalam periode penanaman yang dilakukan oleh santri, pihak agronomi memberikan edukasi secara langsung mengenai penanaman ubi secara tepat.

“ santri paham bagaimana bercocok tanam yang baik selain itu juga karena mereka ikut dilibatkan sebagai tenaga kerja juga ada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai mereka” Muhammad Mujayyin

Berdasarkan penjelasan Muhammad Mujayyin, adanya keterlibatan santri pada penanaman ubi memberikan manfaat secara *soft skill*. Kemampuan bercocok tanam ubi yang diberikan kepada santri dapat menjadi bentuk program pengembangan kewirausahaan bagi santri. Manfaat lain yang dirasakan adalah hasil dari penanaman ubi dapat memberikan pemasukan secara finansial bagi santri. Pemasukan finansial yang dirasakan santri diperoleh dari upaya keterlibatan mereka dalam proses penanaman ubi.

Manfaat yang diperoleh santri dalam program pengelolaan wakaf sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak pondok pesantren. Meskipun santri belum memperoleh edukasi mengenai pengelolaan pasca panen, namun upaya melibatkan santri ke dalam proses penanaman ubi merupakan sebuah sarana bagi santri untuk mampu belajar langsung di lapangan mengenai pertanian. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mujayyin bahwa bentuk edukasi kewirausahaan yang diberikan pesantren diharapkan mampu mencetak lulusan pondok pesantren

yang tidak hanya pandai dalam ilmu agama namun mampu menopang perekonomiannya secara mandiri.

Manfaat yang dirasakan oleh santri dengan adanya wakaf sesuai dengan yang diungkapkan pada teori pemberdayaan ekonomi oleh Hutomo (2000). Menurut Hutomo pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan, (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah atau rentan.

Hingga periode ke empat penanaman ubi, sementara ini santri tidak dilibatkan kembali. Alasan keputusan tersebut karena pada 2 periode ini proses penanaman ubi dilakukan secara mekanis menggunakan alat. Pada periode ini santri diberikan ruang untuk mengamati dan memberikan masukan. Lahan pertanian pada periode ini dikerjakan oleh pihak profesional yang dibawah naungan tim agronomi GP Ansor. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Fachrul :

“...sekarang program pelatihannya sedang berhenti, berhenti ini bukan karena berhenti programnya tapi kita masih menyesuaikan tadi market yang kita bentuk apakah sudah cukup untuk menopang biaya yang nantinya akan timbul atau enggak. Bahasanya ini wakaf produktif, keuntungannya gak kita pupuk tapi kita kembalikan langsung berupa nanti melatih santri jadi pintar terus memberi penghasilan masyarakat di sekitar.”

Pondok pesantren Darul Ilmi wal Amal merupakan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Cianjur. Lahan wakaf yang luas dimiliki oleh pondok pesantren menjadi salah satu latar belakang adanya pengelolaan wakaf produktif di bidang pertanian. Pengelolaan wakaf yang dilakukan bekerjasama dengan GP Ansor adalah upaya pemanfaatan lahan wakaf yang belum optimal dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wakaf yang dilakukan GP Ansor adalah bertujuan untuk memberikan manfaat secara luas.

Menurut Zarka dalam Huda dan Haykal (2010), secara konseptual aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan. Wakaf produktif melalui pertanian ubi yang dilakukan oleh LWA merupakan salah satu bentuk konsep pemanfaatan wakaf untuk layanan pendidikan. Layanan pendidikan diberikan melalui penyaluran hasil penjualan komoditas dari pertanian ubi yang ditanam di atas tanah wakaf.

Pengelolaan lahan wakaf yang dilakukan melalui bidang pertanian ikut memberikan manfaat bagi pihak pesantren. Meskipun secara manfaat finansial belum diperoleh oleh pesantren namun manfaat secara pemberdayaan ekonomi telah dirasakan oleh pesantren. Salah satu bentuk manfaat pemberdayaan yang dirasakan oleh pihak pesantren adalah di bidang sumber daya manusia. Pondok pesantren Darul Ilmi wal Amal sendiri merupakan pondok pesantren yang berfokus untuk mendidik santri yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anak yatim.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui pertanian ubi memberikan peran dalam pemberdayaan ekonomi. Tujuan akhir tercapainya pemberdayaan ekonomi

yang dirasakan oleh Pondok Pesantren diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pesantren. Kesejahteraan yang diharapkan mampu dirasakan pesantren sejalan dengan kesejahteraan menurut kriteria Kaldor Hicks yang menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan membantu orang lain yang dirugikan sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang lain yang bertambah kaya.

Pemberdayaan lahan wakaf yang dilakukan melalui bidang pertanian memberikan kesempatan santri untuk ikut berperan dalam proses budidaya. Edukasi yang diperoleh santri memberikan manfaat bagi pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yaitu santri. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diperoleh tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pembelajaran kewirausahaan seperti yang telah menjadi dasar rancangan pengasuh pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Mujayyin :

“Dampak secara finansial belum ada karena hasil finansial secara penuh belum kelihatan namun secara sdm santri jadi paham bagaimana bercocok tanam secara profesional bagaimana penanaman bibit yang baik karena mereka kan dari Ansornya dibimbing langsung sama tim agronomi yang profesional”

Edukasi yang menjadi bekal bagi santri merupakan salah satu upaya pemberdayaan di bidang sumber daya manusia dan ekonomi sejalan dengan pendapat Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bentuk upaya pemberdayaan yang diperoleh para santri dari adanya wakaf adalah penguatan daya. Namun

pemberdayaan pada kemandirian pada proses ini belum dirasa terlihat nyata karena yang dirasakan hanyalah edukasi pada tata cara bertanam belum mencakup pada edukasi pengolahan pasca panen.

Selain itu, pemberdayaan dalam bentuk hasil finansial juga belum banyak dirasakan karena belum ada hasil secara finansial yang matang dari adanya wakaf pertanian. Sedangkan menurut pendapat Sugarto adanya pemberdayaan adalah kemampuan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemampuan mengakses kebutuhan barang dan jasa melalui prolehan finansial belum dapat terukur pada hasil wakaf pertanian ubi dikarenakan masih adanya kendala dalam prosesnya yang hingga saat ini masih dalam proses pembenahan dan pembelajaran.

Namun jika dalam panjang telah menghasilkan manfaat secara finansial, pemanfaatan finansial yang diperoleh pondok pesantren adalah sepenuhnya untuk pengembangan pendidikan santri. Adanya manfaat finansial yang akan diperoleh pesantren dapat menjadi jembatan bagi kebutuhan ekonomi pesantren. Oleh karena itu adanya manfaat yang dirasakan pondok pesantren dapat membantu pesantren untuk mampu mandiri secara ekonomi.

4.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dalam tabel 4.3 akan dijelaskan secara ringkas yang dilakukan peneliti guna memudahkan dalam memahami penelitian ini.

4.3 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian

No	Pola	Hasil dan Pembahasan	Teori	Kesimpulan
1	Skema Pengelolaan Wakaf melalui Pertanian Ubi Secara Garis Besar	Pengelolaan wakaf melalui pertanian ubi jepang secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Bagian tersebut diantaranya (1) Pola pertama menjelaskan mengenai bentuk kerjasama yang dijalin antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren, (2) Pola kedua adalah pola pengelolaan masa tanam ubi yang berada dibawah tanggungjawab Lembaga Wakaf Ansor, (3) . Pola ketiga adalah pola pemasaran yang merupakan salah satu bentuk manajemen pasca panen. Secara garis besar pola pengelolaan wakaf pertanian ubi dikelola oleh Lembaga Wakaf Ansor yang melibatkan Pesantren Darul Ilmi wal Amal sebagai Mitra. Selama masa tanam ubi, penanaman ubi dikelola oleh tenaga profesional. Hingga hasilnya disalurkan salah satunya sebagai bentuk pemberdayaan bagi pondok pesantren.	Menurut Zarka dalam Huda dan Haykal (2010), secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan.	Pada pola wakaf pertanian ubi secara garis besar terlihat bahwa wakaf pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh LWA dalam memberdayakan lahan wakaf Pondok Pesantren. Selain itu wakaf pertanian ubi merupakan salah satu bentuk peran yang dilakukan LWA untuk memberdayakan lahan wakaf yang belum dikelola secara maksimal. Melalui wakaf produktif pertanian merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengelola wakaf produktif melalui pertanian.

No	Pola	Hasil dan Pembahasan	Teori	Kesimpulan
2	Pola Pertama : Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren	Pola pertama menunjukkan pola kerjasama yang dijalin oleh LWA dengan pondok pesantren. Kerjasama didasari atas kepemilikan tanah wakaf oleh pesantren yang belum dikelola secara maksimal. Sedangkan LWA sebagai lembaga wakaf memiliki kemampuan mengelola wakaf yang belum dimanfaatkan. Kemudian kedua pihak melakukan kerjasama dimana LWA menggunakan lahan wakaf pesantren sebagai media pengelolaan wakaf produktif. Adanya kerjasama keduanya menghasilkan pengelolaan wakaf melalui pertanian ubi. Hasil dari pertanian ubi diberikan juga kepada pesantren sebagai bentuk pendanaan pendidikan santri dan memberikan edukasi pertanian pada santri. Hasil wakaf ditujukan sesuai dengan peruntukan awalnya sebagai kebermanfaatan salah satunya untuk pendidikan pesantren.	<p>1) Teori hak kepemilikan yang mencakup karakteristik transferabilitas yaitu adanya hak kepemilikan harus mampu dipindahkan dari satu pemilik ke pihak lain lewat pertukaran secara sukarela (Tietenberg, 1992).</p> <p>2) Teori kontrak dan asimetris informasi yaitu pada teori prinsipal terdapat setidaknya dua pelaku yang berhubungan yakni principal (<i>principal</i>) dan agen (<i>agent</i>).</p> <p>3) Teori unsur wakaf menurut Undang-Undang tentang Wakaf yaitu peruntukan wakaf dan pengelolaannya harus jelas tanpa mengurangi nilai asli aset wakaf.</p>	Pola pertama menjelaskan secara rinci bahwa kerjasama yang dilakukan antara LWA dengan Pondok Pesantren menjadi salah bentuk adanya pengelolaan wakaf melalui pertanian. Pengelolaan wakaf dilakukan melalui kerjasama antara LWA dengan pihak pesantren. Dimana Pesantren secara teori kontrak berperan sebagai Principal sedangkan LWA sebagai Agen. Bentuk manfaat yang diperoleh pesantren sebagai principal dengan adanya wakaf adalah pemberdayaan ekonomi melalui edukasi dan pendanaan untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren.

No	Pola	Hasil dan Pembahasan	Teori	Kesimpulan
3	Pola Kedua : Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi	Pola kedua merupakan pola yang menjelaskan alur pengelolaan selama masa tanam wakaf pertanian ubi. Selama masa tanam ubi, LWA dibantu oleh tenaga profesional yang merupakan bagian internal GP Ansor. Tenaga profesional berperan dalam mengelola pertanian ubi secara teknis hingga memasuki tahap panen. Dalam pola kedua, LWA hanya berperan menjadi pengawas selama masa penanaman ubi hingga masuk panen. Pada saat memasuki masa panen, LWA berperan memasarkan hasil panen. Dimana hasil dari penjualan panen juga diberikan kepada tenaga profesional sebagai upah.	Teori menurut pendapat Imam Maliki menunjukkan bahwa wakaf produktif adalah salah satu upaya untuk menggunakan manfaat dari suatu harta wakaf. Pendapat dari Imam Maliki mendukung bahwa wakaf harus dikelola secara produktif agar relevan dan tidak boleh menghilangkan karakter kekekalan wakaf (Al-Zuhaili, 1997).	Pola kedua memberikan penjelasan tentang pola teknis pengelolaan selama masa tanam ubi. LWA dalam proses teknis berperan dalam mengawasi penggarapan lahan hingga panen. Sedangkan teknis penggarapan ubi dilakukan oleh tenaga profesional di bidang pertanian. Dalam pengelolaan LWA bertanggungjawab juga menjaga agar proses pengelolaan tidak mengurangi nilai asli wakaf dan mencapai tujuan peruntukan wakaf.

No	Pola	Hasil dan Pembahasan	Teori	Kesimpulan
4	Pola Ketiga : Pengelolaan Pasca Panen Wakaf Pertanian Ubi	Pola ketiga merupakan pola yang menjelaskan tentang pengelolaan pasca panen. Pada pola ketiga LWA sebagai nadzir wakaf bereperan penuh. LWA berperan memasarkan hasil panen ubi langsung ke dua pasar yaitu lokal dan ekspor. Pemasaran ekspor dilakukan dengan kontrak bersama perusahaan ekspor. Setelah hasil panen terjual LWA memperoleh hasil penjualan berupa pemasukan finansial. Keuntungan dari adanya penjualan ubi dialokasikan oleh LWA ke dalam tiga bentuk yaitu pembiayaan untuk pengembangan pendidikan anak yatim di Pondok Pesantren, Modal perluasan lahan pertanian ubi, dan pembiayaan kegiatan sosial yang memiliki manfaat untuk masyarakat.	Pola kelola dan manajemen wakaf produktif diperlukan untuk melindungi keberadaan wakaf dan hasil dari pengelolaan wakaf dari beberapa hal yang ada didalamnya diantaranya : 1) Efek “ <i>Good Deed</i> ” : Manajemen wakaf harus mengarah kepada kebermanfaatan yang lebih besar. Tidak hanya memberdayakan tapi juga mempertimbangkan dampaknya. 2) Efek “ <i>Free Rider</i> ” : Hal ini terjadi saat nilai asli dari aset yang diwakafkan menjadi berkurang saat dimanfaatkan. 3) Efek “ <i>Income Redistribution</i> ” : Manajemen wakaf harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan operasionalisasi dalam upaya mencapai distribusi pendapatan yang signifikan (Direktorat Jenderal	Pola ketiga menggambarkan tentang alur distribusi pasca panen. Dalam pengelolaan pasca panen, LWA memiliki peran penting untuk menyalurkan ubi kepada pasar yang sudah di tentukan baik lokal maupun ekspor. Hasil yang diperoleh dari penjualan ubi disalurkan dalam 3 bentuk yaitu pengembangan pesantren, perluasan budidaya ubi, dan modal untuk pengembangan kegiatan produktif yang bernilai manfaat bagi masyarakat.

			Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).	
5.	Peran Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	Adanya wakaf pertanian yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren memberikan kesempatan bagi pesantren untuk memberikan media pembelajaran bagi santrinya dalam memahami dunia wirausaha di bidang pertanian. Pembelajaran bercocok tanam yang diperoleh santri dari adanya wakaf pertanian diharapkan mampu menjadi bekal mereka agar dapat mandiri setelah lulus dari pesantren. Selain manfaat dari sisi pembelajaran, adanya wakaf pesantren juga memberikan manfaat operasional bagi pesantren. Pesantren mitra dalam wakaf merupakan pesantren yang memberikan pendidikan bagi anak yatim dan kurang mampu. Hasil pertanian dari wakaf ubi diharapkan mampu membantu secara finansial dalam pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren.	1) Teori Pemberdayaan menurut Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (<i>enabling</i>), memperkuat potensi atau daya (<i>empowering</i>), dan terciptanya kemandirian. 2) Hutomo berpendapat pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya.	Wakaf pertanian ubi memberikan manfaat dalam sisi pemberdayaan sumber daya. Peran pemberdayaa yang dilakukan melalui wakaf pertanian ubi berupa pengembangan <i>softskill</i> santri. Namun belum terdapat hasil nyata dari bentuk pemberdayaan secara finansial yang diperoleh pesantren. Sehingga pemberdayaan ekonomi yang terjadi belum secara maksimal terlaksana namun telah memberikan pemberdayaan secara sumber daya manusia.

Sumber : Data Lapang, 2018.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yang dilandaskan pada teori yang sudah diangkat dan beberapa saran. Saran yang akan dibahas terkait dengan pola alokasi wakaf melalui wakaf pertanian dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren pada Lembaga Wakaf Ansor dan peran wakaf pertanian pada pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal.

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan lahan wakaf melalui pertanian ubi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Ansor merupakan bentuk kerjasama dengan Pondok Pesantren. Pola pada pengelolaan wakaf pertanian ubi terdapat satu pola umum. Pola umum yang terdapat dalam pengelolaan wakaf terbagi menjadi 3 pola kecil dan dari hasil lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pola Pertama (Pola Kerjasama Lembaga Wakaf Ansor dengan Pondok Pesantren) : Pola pertama menunjukkan bahwa terdapat bentuk kerjasama dalam pengelolaan wakaf yaitu antara Lembaga Wakaf Ansor dengan Pesantren Darul Ilmi wal 'Amal. Pengelolaan wakaf yang memanfaatkan lahan wakaf pesantren ditujukan sebagai upaya pemberdayaan dan peruntukan kebermanfaatan lahan wakaf. Kerjasama

yang dilakukan memberikan hasil yang efektif dengan tujuan peruntukan awal wakaf terhadap kebermanfaatan.

- 2) Pola Kedua (Pola Teknis Pengelolaan pada Masa Tanam Wakaf Pertanian Ubi) : Pola kedua memberikan penjelasan tentang pola teknis pengelolaan selama masa tanam ubi. Pada pola kedua menunjukkan bahwa proses pengelolaan wakaf pertanian telah berupaya untuk sesuai dengan prinsip dalam manajemen kelola wakaf produktif dan mempertahankan karakteristik asli dari aset wakaf. Namun belum adanya manajemen pengelolaan yang rapi membuat proses tanam sempat mengalami kegagalan dan mengalami permasalahan.
- 3) Pola Ketiga (Pola Pengelolaan Pasca Panen Hasil dari Wakaf Pertanian Ubi) : Pola ketiga menggambarkan tentang alur distribusi pasca panen. Hasil yang diperoleh dari penjualan ubi disalurkan dalam 3 bentuk yaitu pengembangan pesantren, perluasan budidaya ubi, dan modal untuk pengembangan kegiatan produktif yang bernilai manfaat bagi masyarakat. Namun pada temuan lapangan menunjukkan belum ada hasil secara pasti dan berkala dari penjualan pasca panen karena terjadi kegagalan panen dan belum terdapat pengelolaan yang memberikan nilai tambah dari komoditas. Kegagalan terjadi karena belum terdapat penguasaan terhadap permintaan pasar akan komoditas ubi sehingga nilai jual komoditas lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.
- 4) Wakaf pertanian ubi memberikan manfaat dalam sisi pemberdayaan sumber daya. Peran pemberdayaan yang dilakukan melalui wakaf pertanian ubi berupa pengembangan *softskill* santri. Namun belum terdapat hasil nyata dalam bentuk pemberdayaan secara finansial yang

diperoleh pesantren. Hal tersebut terjadi karena pada saat ini wakaf pertanian ubi masih dalam proses pengenalan terhadap pasar komoditas ubi. Sehingga pemberdayaan ekonomi yang terjadi belum secara maksimal terlaksana namun telah memberikan pemberdayaan secara sumber daya manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil temuan yang sudah dilakukan di lapangan, maka peneliti melihat perlu beberapa saran perbaikan pada level teoritis dan aplikasi pada lapangan..

- 1) Perlu adanya manajemen pengelolaan wakaf yang sesuai dengan keadaan pasar dan proses tanam pertanian ubi. Agar dapat meminimalisir kerugian saat terjadinya kegagalan sehingga proses pengelolaan bisa berjalan dan tidak mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan pertanian memiliki resiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lain.
- 2) Agar pemberdayaan ekonomi terhadap hasil wakaf pertanian dapat dirasakan secara finansial maka perlu ada strategi pasar yang harus dikenali lebih jauh agar hasil panen memiliki nilai jual yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga tidak dapat meminimalisir kerugian akibat asimetri informasi yang dialami terkait pasar komoditas panen.
- 3) Pertimbangan akan penguasaan pasar melalui pengelolaan hasil panen lebih lanjut perlu menjadi fokus selain menjual hasil panen dengan kontrak bersama perusahaan. Pengelolaan hasil panen yang memiliki nilai tambah juga diharapkan bisa menjadi sumber penggerak pemberdayaan santri agar memiliki kemampuan mengelola hasil pertanian selain hanya

skill dalam bercocok tanam. Sehingga hasil dari pengelolaan dapat menutupi resiko terjadinya kerugian atau kegagalan dalam proses pengelolaan wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Faisal Haq dan A, Saiful Anam. 1993. *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad. 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Khatib, Muhammad, t.t. *Al-Iqna'*, Bairut: Darul Ma'arifah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. terj. Said Aqil Husain al-Munawar dan Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Arif, Syafrudin. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol 4 No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Badan Wakaf Indonesia. 2007. Sejarah dan Perkembangan Wakaf. <https://bwi.or.id/index.php/in/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html> diakses pada 9 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.
- Birner, Regina. 1996. *The Role of Livestock in Economic Development: Theory and Empirical Evidence (The Case of Sri Lanka)*. Dissertation. Germany: Gottingen University.
- Bromley, D.W. dan M.M. Cernea. 1989. *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*. Washington DC: World Bank.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Carporaso, James A. dan David P. Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. United States of America: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dixit, Avinash. 1996. *The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective*. Cambridge: CES and The MIT Press.

- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. *Jurnal Gizi dan Pangan*, Vol 1 No. 1. Jakarta.
- Donna, Duddy Roesmara. 2007. Penerapan Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Public Islami. *Journal of Islamic Business and Economics*, Vol. 1 No 1.
- Fauzia, Amelia. dan Ary Hermawan. dalam Thaha, Idris (Ed). 2003. *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.
- Furubotn, Eirik dan Rudolf Ritcher. 2000. Property Rights and Economy Theory: A Survey of Recent Literatur. *Journal of Economic Literature*. Vol 10: 1137-1162.
- Fyzee, Asaf A.A. 1963. *A Modern Approach to Islam*. Bombay : Asia Publishing House.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, Nurul, dan Heykal, Muhammad., 2010. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana, Prenada Media Group.
- Huda, Nurul., Rini, Nova., Mardoni, Yosi., Hudori, Khamim., and Anggraini, Desti., 2017. Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol 38. No. 1.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta : Adiyana Press.
- Ismail, Asep Usman. 2008. *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhuafa*. Jakarta: Dakwah Press.
- Juhanda, Arief Muzacky. 2011. *Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- J. Amuda, Yusuff., Embi, Azizan., and Batubane, Oladapo. 2014. An Agricultural Approach to The Commercialization of Cash Waqf between Malaysia and Nigeria. *Journal of Advance Management Science* Vol. 2 No. 4.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Agama.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2017. *Market Brief Ubi Jalar di Korea Selatan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2016. *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Ubi Jalar*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pertanian Kemeterian Pertanian.

- Lembaga Wakaf Ansor. 2017. Profil dan Program Lembaga Wakaf Ansor. <http://wakafansor.com/tentang-lwa/> diakses pada 5 Januari 2018 pukul 12.00 WIB.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*. Jakarta : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Menard, Claude. 2000. *Enforcement Procedures and Governance Structures: What Relationship?*. United Kingdom: Aldershot.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muntaqo, Firman. 2015. Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Al Ahkam*, Vol 25 No. 1.
- Muhtasib, A. B. 2013. *Wakaf: Instrumen Kesejahteraan Ekonomi yang Terabaikan*. Jakarta.
- Mulyono, Ilya. dan Djohani, Rianingsih. 1996. *Kebijakan dan Strategi Menerapkan Metode PRA dalam Pembangunan Program*. Bandung: Driyamedia.
- Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nasution, S. 1987. *Metode Research (Metode Penelitian Ilmiah)*. Bandung : Jemmars.
- Prijono, Onny S., dan Pranaka, A.M., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Puspitasari, Ajeng Wahyu. 2017. *Optimizing Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity*. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 6 No. 1.
- Rida, Muhyiddin Mas. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa.
- Riyanto , Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* . Surabaya: UNESA University Press.
- Rosmedi, dan Risyanti, Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprit Jatinegara Press.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Saadati, Nila. 2016. Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 7 Nomor 1.
- Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo,

- Shafiai, Muhammad Hakimi., Rizki Moi, Mohammed., and Ahmad, Riayati. 2015. The Potential of Waqf in Activating Idle Agricultural Land. *Jurnal Pengurusan* Vol. 44.
- Sistem Informasi Wakaf. 2017. Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php diakses pada 26 Mei 2018, Pukul 20.00 WIB.
- Stiglitz, Joseph.E. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Bintaro: Pojok Kiri. PT Wahana Aksi Kritika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosisl*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Suharto , Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya.
- Syafi'I, Agus Ahmad, dan Machendrawaty, Nani. 2006. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Jakarta: Rosdakarya.
- Syakir. Sofyan. 2012. *Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber Ekonomi Umat di Kecamatan Tellu, Siattinge Kabupaten Bone*. Thesis. Makassar : Universitas Alauddin Makassar.
- Tietenberg, T. 1992. *Innovation in environmental Policy : Economic and Legal Aspects of Recent Development in environmental Enforcement and Liability*. Vermont USA: Edward Elgar.
- Todaro, M.P. dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tabung Wakaf Indonesia. 2015. Sejarah Perwakafan Islam. <http://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/> diakses pada 1 Desember 2017 pukul 08.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <http://bwi.or.id/index.php/in/regulasi/regulasi-wakaf.html> diakses pada 10 Desember 2017, Pukul 20.00 WIB.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

World Bank. 2002. Millenium Develompent Goals (MDG's).
http://www5.worldbank.org/mdgs/global_partnership.html diakses pada 20
Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB.

Yustika, Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*.
Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yusuf, Hardianti. 2016. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kecamatan
Sibulue, Kabupaten Bone*. Thesis. Makassar : Universitas Negeri Alauddin
Makassar.

Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu'asir.

